

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan proses penting dalam suatu kebijakan. Dengan implementasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka dapat dilihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap target sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Banyak kebijakan yang tidak jelas dampak dan manfaatnya terhadap target sasaran, dikarenakan proses implementasi yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam kebijakan tersebut, bahkan kebijakan tersebut tidak diimplementasikan atau tidak dilaksanakan. Efektifnya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel serta indikator penentu kebijakan. variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi yang efisien.<sup>61</sup> Dalam penelitian Implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang menggunakan dua variabel utama yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening and why?* (apa yang terjadi dan kenapa?) yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini.

#### 5.1 *Compliance* (Kepatuhan)

Ripley dan Franklin menjelaskan variabel *compliance* sebagai tingkat kepatuhan implementor dalam bertindak, apakah sesuai dengan ketentuan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan. Tingkat kepatuhan implementor terhadap kebijakan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari

---

<sup>61</sup>Heru Gernandes. 2015, *Implementasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya di Kota Padang Tahun 2012*. Hlm 80

implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kepatuhan mengacu pada perilaku implementor itu sendiri, apakah sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Serta melihat sejauh mana pemahaman implementor dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dan sesuai dengan apa yang ada dalam kebijakan.

Kebijakan yang mengatur bagaimana program Adiwiyata ini diatur dalam Peraturan Walikota Padang No 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Peraturan ini menjadi pedoman bagaimana implementor bertindak dalam melaksanakan program. Untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan implementor dilapangan maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama adalah bagaimana implementor memahami petunjuk teknis program sehingga mampu menterjemahkan kebijakan dalam bentuk tindakan yang nyata, hal ini berkaitan dengan bagaimana proses transfer informasi terjalin antara para implementor sehingga semua informasi tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Serta yang kedua adalah bagaimana implementor berperilaku dilapangan sesuai dengan standar peraturan yang telah ada, dan melihat apakah perilaku implementor tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program atau tidak.

### **1.1.1 Pemahaman Implementor**

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan/program, implementor harus memahami isi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan setiap langkah dan proses implementasi suatu kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi implementor dilapangan nantinya. Pemahaman implementor terhadap isi kebijakan akan

berimplikasi pada sikap implementor, yang akan menunjukkan sikap mendukung atau tidak dalam sebuah pelaksanaan program.

Program Adiwiyata di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector*, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Sekolah sebagai implementor. Dimana, setiap implementor memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan tupoksi dari OPD masing-masing. Agar para implementor dapat mengetahui, mengerti dan memahami isi dari sebuah kebijakan, diperlukannya sosialisasi kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini, hampir semua implementor tidak mengetahui, mengerti dan memahami isi dari kebijakan tentang pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata. Secara keseluruhan, implementor mengetahui tentang program Adiwiyata, dan sangat mendukung dengan adanya program Adiwiyata di Kota Padang. Namun, mengenai tupoksi-nya, hampir semua implementor belum melaksanakannya. Seperti hal-nya ketika peneliti bertanya mengenai pelaksanaan tupoksi kepada masing-masing implementor, sebagian banyak menjawab memberikan dukungan penuh terhadap Program Adiwiyata, namun program Adiwiyata lebih di tekankan lagi pelaksanaannya di sekolah masing-masing. Dan ketika peneliti coba menanyakan mengenai pedoman pelaksanaan dari program Adiwiyata, sebagian besar dari implementor kurang mengetahui tentang adanya pedoman pelaksanaan program Adiwiyata tersebut. Sebagaimana pedoman pelaksanaan Adiwiyata yang di muat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan sebagai berikut:

“...pedoman yang mana? Pedoman Adiwiyata ya itu yang ada dalam peraturan menteri sudah lengkap semua itu. Peraturan yang lainnya Cuma mengikuti saja itu. Sejauh ini bagi sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata kami bantu dengan baik” (wawancara dengan Ibu T. Masfetrin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 21 Maret 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa DLH mengetahui tentang program Adiwiyata, namun tidak tahu mengenai pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata, yang mana pada tingkat kota Padang, pelaksanaan Program Adiwiyata diatur dengan peraturan walikota Padang. Dalam hal ini terasa aneh apabila implementor tidak mengetahui adanya pedoman pelaksanaan program yang di atur oleh Walikota, sedangkan program Adiwiyata di Kota Padang tetap berjalan. Selain dari Dinas Lingkungan Hidup, peneliti mencoba menanyakan hal serupa kepada OPD lainnya yang terlibat sebagai implementor Program Adiwiyata, seperti kepada Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai berikut:

“...program Adiwiyata itu kan merupakan program dari kementerian Lingkungan Hidup, yang di laksanakan di seluruh Indonesia, termasuk Kota Padang, melalui perintah dari Walikota. Untuk pelaksanaannya itu lebih ke Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan hanya sebagai fasilitator saja” (wawancara dengan Bapak Indriyedy Bakri, S. Pd. , MT, Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 26 maret 2018)

Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan tentang pedoman pelaksanaan program kepada implementor, peneliti menemukan bahwa implementor tidak tahu tentang pedoman tersebut. Hal ini di ungkapkan implementor dalam wawancara sebagai berikut:

“...mengenai perwako, kami tidak tahu menahu, sebab selama ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan mengenai perwako yang disebutkan itu. Kami hanya menjalankan program Adiwiyata dengan memberikan dukungan dan fasilitas kepada sekolah. Selebihnya itu wewenang dari sekolah yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup” (wawancara dengan Bapak Indriyedy Bakri, S. Pd. , MT, Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 26 maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa implementor dari Dinas Pendidikan tidak mengetahui tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, yang di atur dalam Perwako no 43 tahun 2016. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada sosialisasi mengenai perwako tersebut. Hal senada juga di sampaikan oleh implementor dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang, dalam wawancara sebagai berikut:

“...pedoman tersebut baru kemarin saya lihat di internet, dan sudah saya *screenshot*” (wawancara dengan Bapak Afri Moni, Kantor Kementerian Agama Kota Padang, tanggal 27 Maret 2018)

Dari bukti wawancara tersebut dapat diketahui bahwa implementor dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang tidak mendapatkan sosialisasi mengenai Perwako No 43 Tahun 2016. Namun hal tersebut tidak mengurungkan semangat dari implementor untuk menjalankan Program Adiwiyata. Hal ini berdampak pada prestasi yang didapatkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang. Yang telah berhasil menjadi kota dengan Sekolah Adiwiyata terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kunjungan-kunjungan yang peneliti lakukan ke beberapa sekolah yang telah menjadi sekolah Adiwiyata, peneliti mencoba menanyakan mengenai pedoman pelaksanaan yang diketahui oleh masing-masing sekolah. Namun,

kenyataan yang peneliti temukan dilapangan, sebanyak 4 sekolah (SD Bustanul Ulum, SDN 13 Nanggalo, SMPN 31 Andalas, dan MTsN Durian Tarung) tidak mengetahui tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Walikota Padang, yaitu Perwako No 43 tahun 2016, mereka hanya mengetahui pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan lebih berpedoman kepada sekolah yang menjadi Pembina-nya. Hal ini diungkapkan seperti kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua tim Adiwiyata dari SDN 13 Nanggalo Kota Padang, sebagai berikut:

“...setau saya, tidak ada pedoman dari walikota, kan sudah ada yang dari kementerian lingkungan hidup, disana sudah lengkap semua, dan kami kebanyakan mencontoh dari sekolah-sekolah Pembina saja, karena apa yang diberikan oleh sekolah Pembina kan itu memang sudah SOP nya”(wawancara dengan bapak Marsal Maret, S. Pd selaku operator tim Adiwiyata SDN 13 Nanggalo Kota Padang, pada tanggal 14 mei 2018)

Ketidaktahuan dari implementor terhadap pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata yang dikeluarkan oleh walikota Padang, dapat menyebabkan kekeliruan terhadap pelaksanaan tugas oleh implementor tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemegang kebijakan. Sehingga Implementor harus mencari tahu sendiri. Namun implementor beralih bahwa perwako tersebut hanya merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri, jadi secara keseluruhan itu sama saja. Jadi mereka merasa tidak perlu tahu tentang adanya perwako tersebut. Hal ini lah yang dapat mengakibatkan tidak selarasnya antara tugas yang ada didalam perwako dengan yang dilaksanakan oleh implementor.

Selain dari data wawancara, pemahamnya implementor terhadap kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kemampuan implementor menerjemahkan kebijakan dalam

bentuk memasukkan program dan kegiatan dalam bentuk tindakan nyata yang berhubungan untuk mendukung jalannya program Adiwiyata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 1**  
**Tugas Implementor dalam Program Adiwiyata**

Nama OPD	Tugas sesuai Perwako No. 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Kota Padang	Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan calon sekolah Adiwiyata, penanggungjawab Adiwiyata dan operasi aplikasi Adiwiyata untuk ditetapkan oleh walikota</li> <li>2. Melakukan pembinaan/ pelatihan kepada operator aplikasi Adiwiyata paling lambat (2) bulan setelah diumumkan sekolah Adiwiyata Nasional</li> <li>3. Membuat jadwal rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk evaluasi pelaksanaan pembinaan sekolah Adiwiyata</li> <li>4. Melaporkan ke Walikota perkembangan pelaksanaan pembinaan sekolah Adiwiyata</li> </ol>	<p>Bidang yang terlibat dalam implementasi Program Adiwiyata di DLH adalah bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan berupa sosialisasi yang diberikan pada awal pelaksanaan program Adiwiyata. Sosialisasi dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan, mengundang seluruh kepala sekolah yang akan mengikuti Program Adiwiyata</li> <li>2. Tidak ada jadwal rapat koordinasi dengan OPD lain yang terlibat. Keterlibatan OPD lainnya merupakan koordinasi OPD tersebut dengan sekolah</li> <li>3. Pelaporan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pelaporan juga sering dilakukan melalui grup <i>Whatsapp</i> Adiwiyata.</li> </ol>
Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan muatan Adiwiyata kedalam kurikulum tingkat satuan pendidikan</li> <li>2. Melakukan evaluasi sekali 6 (enam) bulan terhadap muatan Adiwiyata yang diajarkan oleh guru</li> </ol>	<p>Bidang yang terlibat dalam Implementasi Adiwiyata adalah Bidang Penjaminan Mutu dan Pengawas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana dan Prasarana untuk menunjang Program Adiwiyata seperti tong sampah</li> <li>2. Sosialisai, dan himbauan tertulis kepada sekolah.</li> <li>3. Rapat koordinasi dengan DLH 1 kali dalam setahun dalam hal penilaian Adiwiyata.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan DLH, Puskesmas dalam</li> </ol>

		Program UKS, Camat, dan Lurah, mengenai sekolah dan lingkungan
Kementerian Agama	Pembinaan dan penilaian Adiwiyata	Tidak ada program tentang Adiwiyata, hanya mengikuti penilaian dan <i>follow up</i> sekolah untuk mengikuti Program Adiwiyata
Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan</li> <li>2. Sekolah Adiwiyata Nasional membuat jadwal pembinaan sekolah calon Adiwiyata Kota dan berkoordinasi dengan DLH</li> <li>3. Sekolah Adiwiyata Nasional wajib memiliki 10 (sepuluh) sekolah binaan paling lambat satu bulan setelah penetapan</li> <li>4. Bagi sekolah dan penanggung jawab Adiwiyata Propinsi dan nasional wajib mengikuti pelatihan/ pembinaan rapat koordinasi dengan Bapedalda (DLH) Provinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah telah memiliki sarana dan prasarana sendiri sesuai dengan kriteria Sekolah Adiwiyata.</li> <li>2. Sekolah melakukan pembinaan kepada sekolah imbas dengan berkoordinasi dengan sekolah imbas dan membuat jadwal pembinaan</li> <li>3. Tidak ada pelatihan/pembinaan/rapat koordinasi dengan DLH Provinsi. Sekolah yang mempunyai kepentingan datang langsung ke kantor DLH Kota Padang.</li> </ol>
Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti pembinaan/ pelatihan yang dilaksanakan oleh Pembina Adiwiyata</li> <li>2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Adiwiyata setiap 3 bulan ke DLH</li> <li>3. Menetapkan satu orang penanggung jawab Adiwiyata dan dua orang tenaga operasional Aplikasi Adiwiyata</li> <li>4. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang memuat program upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan</li> <li>5. Membuat SOP pencapaian Adiwiyata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala sekolah menunjuk tim Adiwiyata sekolah dan berkoordinasi dengan tim tersebut.</li> <li>2. Kepala sekolah berperan aktif dalam urusan Adiwiyata</li> <li>3. Sebagian besar kelengkapan dan data-data Adiwiyata di pegang oleh Ketua Tim Adiwiyata sekolah, sehingga terkadang ketua Tim Adiwiyata lebih besar perannya daripada kepala sekolah</li> </ol>
Guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup</li> <li>2. Memasukkan muatan Adiwiyata dalam kurikulum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya guru yang dilibatkan dalam tim Adiwiyata yang mengerti tentang Program Adiwiyata disekolahnya.</li> <li>2. Terdapat unsure Adiwiyata dan pelestarian lingkungan dalam kurikulum pembelajaran</li> </ol>
OPD yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Adiwiyata</li> <li>2. Membuat jadwal pembinaan ke sekolah dan berkoordinasi dengan</li> </ol>	<p>Terdapat beberapa OPD lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang. Seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan (Puskesmas)</li> </ol>



	DLH 3. Memberi bantuan berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Adiwiyata	Puskesmas mempunyai program Kesehatan Lingkungan, UKS, Promosi Kesehatan, dan Gizi. Dalam hal ini puskesmas melakukan pembinaan kepada setiap sekolah yang bersedia diberikan pembinaan. 2. Kantor Camat Kantor Camat dalam hal ini membantu koordinasi sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah, dan untuk menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.
--	---	---

*Sumber: olahan peneliti, 2018*

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa adanya keterlibatan OPD untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata. Seluruh OPD yang terlibat memberikan dukungan dan partisipasi terhadap Program Adiwiyata. Namun, mengenai pedoman pelaksanaan program Adiwiyata, secara keseluruhan OPD yang terlibat tidak mengetahui tentang pedoman tersebut. Karena mereka tidak mendapatkan sosialisasi tentang Pedoman tersebut yang diatur melalui Peraturan Walikota Padang, sehingga ada sebagian tupoksi yang tidak dilaksanakan oleh OPD tersebut. Bahkan ada OPD yang tidak mempunyai kegiatan khusus untuk Program Adiwiyata.

Seharusnya implementor mengetahui adanya pedoman pelaksanaan tersebut, sehingga dalam melaksanakan tugasnya ada standar yang harus dilaksanakan, sehingga implementasi program lebih baik dan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan Program Adiwiyata pada sudah sangat baik.

### 1.1.2 Perilaku Implementor

Perilaku implementor dapat dilihat dari bagaimana sikap implementor dalam implementor dalam mengimplementasikan Program Adiwiyata. Kesesuaian sikap seluruh implementor yang terlibat dengan kebijakan yang mengatur pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang. Dimana seluruh implementor mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Sikap implementor terhadap kebijakan dapat dilihat dari apakah implementor mematuhi kebijakan, mematuhi petunjuk teknis kebijakan dan juga dari kepatuhan bawahan terhadap perintah/mandat atasan. Implementor tidak hanya sekedar mengetahui tugasnya, namun juga memberikan dukungan dan menunjukkan kemauan dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan program. Dalam melaksanakan Program Adiwiyata di Kota Padang, implementor yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan OPD lainnya yang terkait (dalam hal ini yaitu Puskesmas dan Kantor Camat).

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, terdapat tugas dan fungsi masing-masing implementor yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas OPD masing-masing. Peraturan ini menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak dalam melaksanakan Program Adiwiyata untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut akan peneliti jelaskan satu-persatu perilaku yang ditunjukkan oleh

implementor dalam melaksanakan program berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti dibawah ini:

#### **5. 1. 2. 1 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang merupakan dinas baru yang ada di Kota Padang dan merupakan gabungan dari dua dinas yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang, yang sekarang disatukan menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang. DLH merupakan dinas yang bergerak dibidang kebersihan dan penanggulangan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kota Padang. Sebagai implementor dalam Program Adiwiyata, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengajukan calon sekolah Adiwiyata, penanggungjawab Adiwiyata dan operator aplikasi Adiwiyata yang akan ditetapkan oleh Walikota.

Dalam pelaksanaan Program Adiwiyata, pemerintah Kota Padang mewajibkan seluruh sekolah untuk mengikuti pembinaan Adiwiyata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan. Setiap sekolah diberikan kewajiban tanpa terkecuali dalam pelaksanaan Program Adiwiyata, jikalau ada sekolah yang belum mengikuti Program Adiwiyata dan atau tidak mendukung jalannya Program Adiwiyata, maka akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Kota Padang. Jadi, dalam hal ini sekolah merupakan komponen paling penting

dalam pelaksanaan Program Adiwiyata. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Walikota Padang Nomor 050. 2701/DP. Sekre. 3/VI/2014 tentang Adiwiyata.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang telah berkomitmen untuk melaksanakan Program Adiwiyata dengan mewajibkan pelaksanaannya pada semua sekolah. Seperti yang peneliti kutip berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk T. Masfetrin, S. Pt, M. Si selaku Kabid PK2L DLH Kota Padang sebagai berikut:

“...program Adiwiyata ini mewajibkan semua sekolah di Kota Padang, jadi sekolah yang mengusulkan diri melalui sekolah pembinanya, nanti sekolah Pembina yang kan membina lebih lanjut, DLH hanya memberikan sosialisasi saja. Untuk teknis Adiwiyata di sekolah itu kami serahkan kepada sekolah masing-masing, bagaimana upayanya, mereka berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak lainnya (Wawancara dengan Ibuk T. Masfetrin, DLH Kota Padang, tanggal 21 Maret 2018)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa untuk pengajuan calon sekolah Adiwiyata dilakukan oleh sekolah tersebut, dengan mengusulkan diri untuk dibina oleh sekolah Adiwiyata Nasional. Jadi, DLH tidak mengajukan calon sekolah Adiwiyata, melainkan telah diwajibkan oleh pemerintah Kota Padang kepada semua sekolah, dan sekolah harus mengusulkan diri kepada sekolah Adiwiyata Nasional untuk dibina menjadi sekolah Adiwiyata Kota.

Sementara itu, operator aplikasi Adiwiyata di sekolah ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui surat keputusan Kepala Sekolah. Hal ini peneliti buktikan dengan melakukan wawancara pada salah satu operator Tim Adiwiyata sekolah, seperti berikut:

“sebenarnya kalau untuk ikut Adiwiyata itu kan memang diwajibkan dari walikota, jadi kami mengusulkan diri kepada sekolah Pembina. Nanti masing-masing sekolah itu punya tim Adiwiyata, yang di pilih berdasarkan rapat, dan ditetapkan oleh kepala sekolah. ”  
(wawancara dengan Bapak Marsal Maret, S. Pd, selaku operator Adiwiyata SDN 13 Nanggalo, pada tanggal 14 Mei 2018)

Pada wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa sekolah memang diwajibkan untuk mengikuti program Adiwiyata. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekolah, dan bukan karena diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, mengenai pemilihan tim/operator Adiwiyata disekolah, ditetapkan melalui keputusan dari kepala sekolah masing-masing berdasarkan hasil musyawarah. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh pihak dari Dinas Lingkungan Hidup, bahwa pengusulan sekolah calon Adiwiyata dilakukan oleh sekolah itu sendiri berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Walikota Padang, tentang mewajibkan seluruh sekolah di Kota Padang untuk mengikuti Program Adiwiyata.

Berdasarkan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup yang ada dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, DLH memiliki tugas untuk mengusulkan calon sekolah Adiwiyata, penanggung jawab dan operator Aplikasi Adiwiyata yang akan ditetapkan oleh kepala sekolah. Namun, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa sekolah mengusulkan atau mengajukan diri untuk mengikuti program Adiwiyata berdasarkan surat edaran walikota, bukan dengan cara diusulkan oleh DLH Kota Padang. Begitu juga dengan pemilihan operator Adiwiyata sekolah, yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah, bukan diusulkan oleh DLH Kota Padang.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan tugasnya dalam mengajukan calon sekolah Adiwiyata, penanggung jawab dan operator Adiwiyata, melainkan dilakukan sendiri oleh sekolah. Dengan hal ini, dapat dilihat bahwa perilaku DLH terhadap tupoksinya tersebut tidak sejalan, sehingga hal tersebut dilakukan sendiri oleh pihak sekolah. Dalam hal ini terdapat kesalahan dalam pemahaman DLH mengenai tupoksinya yang terdapat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

- b. Melakukan pembinaan/pelatihan kepada operator aplikasi Adiwiyata paling lambat 2 bulan setelah diumumkan sekolah Adiwiyata nasional.

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Program Adiwiyata berdasarkan PermenLH no 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan ibuk T. Masfetrin, S. Pt, M. Si selaku Kabid PK2L DLH Kota Padang sebagai berikut:

“...DLH Kota Padang melaksanakan Program Adiwiyata sesuai dengan PermenLH No 5 tahun 2013, yang dilakukan oleh DLH adalah pembinaan, yaitu berupa sosialisasi kepada sekolah secara bersama-sama dengan mengundang kepala sekolah, ataupun kepada sekolah masing-masing. Yang kedua yaitu penilaian dan verifikasi, terhadap sekolah yang telah dibina dan mengajukan diri untuk dinilai. Yang ketiga adalah pendampingan, yaitu ketika sekolah masuk ke tahap penilaian provinsi dan nasional, DLH melakukan pendampingan kepada sekolah yang akan dinilai oleh tim penilai provinsi dan nasional. (Wawancara dengan Ibuk T. Masfetrin, DLH Kota Padang, tanggal 21 Maret 2018)”

Berdasarkan wawanacara diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terhadap tupoksinya telah melakukan pembinaan dan penilaian terhadap

sekolah yang mengikuti Adiwiyata. Untuk lebih jelas, kegiatan yang telah dilakukan oleh DLH dalam program Adiwiyata adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi kepada sekolah yang mengikuti pembinaan Adiwiyata.

Kegiatan ini dilakukan setelah ditetapkan sekolah Adiwiyata nasional. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan, yang mengundang seluruh kepala sekolah yang akan mengikuti pembinaan Adiwiyata. Sosialisasi merupakan sebuah pengantar kepada sekolah dalam berusaha menjadi sekolah Adiwiyata dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sekolah diminta untuk lebih aktif dalam berkomunikasi dengan sekolah pembinanya sehingga dapat mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat menjadi sekolah Adiwiyata.

**Gambar 5. 1**  
**Kegiatan Sosialisasi Adiwiyata Kepada Kepala Sekolah**



*Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padan, g 2016*

Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa adanya kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada seluruh kepala sekolah yang mengikuti pembinaan Adiwiyata Kota Padang. Sosiaisasi tersebut dilakukan sekali dalam satu periode Adiwiyata atau sekali dalam satu tahun. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, setelah penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional. Namun, sosialisasi yang diberikan hanya kepada kepala sekolah saja, sehingga informasi yang diterima cenderung tidak tersampaikan kepada tim Adiwiyata sekolah. Seperti yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dengan ketua tim Adiwiyata SD Bustanul Ulum Kota Padang, Bapak Ari Gunawan, sebagai berikut:

“...sosialisasi memang ada, yang diundang itu kepala sekolah saja, kami sebagai ketua tim tidak ada diberikan sosialisasi, paling kepala sekolah saja yang memberikan pengarahan, jadi kami memang harus lebih aktif mencari sendiri, karena kepala sekolah kan sibuk, jadi tidak mungkin hanya mengurus adiwiyata saja. (wawancara dengan bapak Ari Gunawan, Ketua Tim Adiwiyata SD Bustanul Ulum Kota Padang pada tanggal 16 September 2017)”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DLH dan Dinas Pendidikan Kota Padang masih belum dirasa efektif oleh pihak sekolah yang mengikuti pembinaan Adiwiyata, karena sosialisasi hanya diberikan kepada kepala sekolah saja, sehingga mereka dari Tim Adiwiyata sekolah tidak mendapatkan informasi yang cukup, terlebih lagi sosialisasi hanya dilakukan satu kali saja. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh DLH kepada sekolah calon Adiwiyata hanya sebatas sosialisasi pada tahapan awal setelah diumumkan sekolah Adiwiyata Nasional. Sehingga,



timsekolah masih harus mendatangi DLH Kota Padang untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Adiwiyata.

2. Melakukan penilaian/ verifikasi dan pendampingan dalam penilaian untuk Adiwiyata Nasional

Penilaian dan verifikasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan OPD lainnya yang terlibat berdasarkan SK Walikota Padang. Setelah melakukan pembinaan maka DLH akan melakukan penilaian kepada sekolah yang telah dibina tersebut. Sebagaimana yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan ibuk T. Masfetrin, S. Pt, M. Si selaku Kabid PK2L DLH Kota Padang sebagai berikut:

“...kegiatan penilaian yang kami lakukan itu untuk sekolah Adiwiyata tingkat Kota, kalau untuk tingkat provinsi, nasional dan mandiri itu kami lakukan namanya verifikasi. Pada tahap verifikasi ini maka kami akan menilai apakah sekolah tersebut layak untuk dinilai pada tingkatan selanjutnya. Namun yang akan menilai adalah tim dari Provinsi dan Nasional. (Wawancara dengan ibuk T. . Masfetrin, DLH Kota Padang, pada tanggal 21 Maret 2018)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa DLH Kota Padang telah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak luar pemerintahan, seperti LSM-Walhi dan Pimpinan Radio Arbes FM. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Pimpinan Radio Arbes FM, Bapak Jejeng Azwardi, seperti yang telah peneliti kutip dalam wawancara berikut:

“...radio Arbes dilibatkan dalam penilaian terhadap sekolah Adiwiyata tingkat Kota Padang, kami diangkat berdasarkan keputusan Walikota, dan berwenang dalam menilai sekolah-sekolah Adiwiyata, apakah telah memenuhi standard dan komponen Adiwiyata. (wawancara dengan Bapak Jejeng Azwardi, Radio Arbes FM, pada tanggal 8 Juni 2018)

**Gambar 5. 2**  
**Penilaian Sekolah Adiwiyata pada SMPN 25 Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2017*

Pada gambar diatas, terlihat bahwa Tim Penilai Adiwiyata melakukan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata. Penilaian Sekolah Adiwiyata meliputi penilaian fisik dan pemahaman warga sekolah terhadap program Adiwiyata. Dalam proses penilaian disediakan formulir untuk menilai ketersediaan sarana dan prasarana yang akan dinilai oleh Tim Penilai, yaitu meliputi:

**Tabel 5. 2**  
**Komponen Penilaian Sarana Pendukung Ramah Lingkungan Sekolah**  
**Adiwiyata**

No	Komponen Penilaian	Indikator
<b>A. Menyediakan Sarana dan Prasarana Untuk Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Sekolah</b>		
1.	Drainase	Aliran Sampah Sedimen Fisik Bangunan Himbauan tentang Drainase
2.	Sampah/ TPS	Kondisi (berserakan, dll) Ketersediaan (tong sampah/TPS) Pemilahan (label/warna) Proses Pemilahan Himbauan tentang sampah/TPS Komposter
3.	Air Bersih- WC (Khusus ketersediaan WC sesuai Permendiknas No 24 Tahun 2007)	Kondisi Air (hidup, bersih, kotor, bau) Kondisi WC (bersih, kotor, wangi, dll) Ketersediaan tong sampah Himbauan (hemat pemakaian air, kebersihan WC, dll)
4.	Ruang Terbuka Hijau	Kerindangan (Luasan cakupan tanaman) Keanekaragaman Hayati (Jumlah dan jenisnya) Perawatan Penataan (Keindahan) Himbauan
5.	Pencahayaan	Penerimaan cahaya (terang/gelap) Protap pemakaian Listrik (Untuk bangun khusus)
6.	Kebisingan/Getaran/Radiasi	Sarana uuntuk mengatasi sumber kebisingan/getaran/radiasi
<b>B. Sarana Prasarana Untuk Mendukung Pembelajaran Lingkungan Hidup di Sekolah</b>		
1.	Taman/Hutan Kebun Sekolah	Keanekaragaman Hayati (Jumlah dan jenisnya) Perawatan Penataan (keindahan) Penamaan Himbauan Terdokumentasi
2.	Toga	Keanekaragaman Hayati (Jumlah dan jenisnya) Perawatan Penataan (kondisi) Penamaan Fungsi Tanaman Himbauan Terdokumentasi (booklet, brosur, tempelan dinding, dll)
3.	Green House	Keanekaragaman Hayati (Jumlah dan jenisnya) Perawatan Penataan (kondisi) Penamaan Fungsi Tanaman Himbauan Terdokumentasi (booklet, brosur, tempelan dinding)

*Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan form penilaian Adiwiyata, 2017*

Tabel diatas merupakan komponen sarana dan prasarana yang mendukung Program Adiwiyata. Hal tersebut yang nantinya akan dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan anggota tim penilai lainnya. Untuk tahapan penilaian sekolah Adiwiyata, dapat dilihat pada Tabel 1. 5 (halaman 28) bagian latar belakang skripsi ini. Selain melakukan penilaian, tim Penilaian Adiwiyata yang terdiri dari DLH Kota Padang bersama dengan OPD lainnya juga sebagai tim pendamping dalam penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Adiwiyata Nasional.

Selain komponen sarana dan prasarana sekolah, guru dan siswa juga termasuk dalam objek penilaian sekolah Adiwiyata. Seperti yang terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 5. 3**  
**Tes Tertulis yang Diberikan Oleh Tim Penilai Kepada Siswa dalam Rangka Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota**



*Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2017*

Gambar tersebut merupakan kondisi pada saat tim Penilai Adiwiyata memberikan tertulis kepada siswa sekolah, untuk menguji pemahaman siswa mengenai program Adiwiyata. Siswa sekolah merupakan target dari pembinaan Adiwiyata, sehingga untuk mengetahui dampak pembinaan yang telah dilakukan, maka siswa juga harus diuji pemahamannya. Selain siswa, tim penilai Adiwiyata juga menguji pemahaman dari guru atau tenaga pendidik sekolah.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh, maka dapat dilihat bahwa DLH sudah melakukan tupoksinya dalam hal pembinaan Adiwiyata, yaitu kegiatan sosialisasi Program Adiwiyata dalam waktu 2 bulan setelah penetapan Adiwiyata Nasional. Selain pembinaan, DLH juga melakukan penilaian terhadap calon sekolah Adiwiyata Kota dan verifikasi lapangan terhadap sekolah Adiwiyata yang akan dinilai oleh tim Nasional. Dalam kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim Nasional, DLH bersama dengan anggota tim penilai lainnya juga melakukan pendampingan kepada tim Nasional yang berkunjung ke sekolah-sekolah Adiwiyata.

- c. Membuat jadwal rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk evaluasi pelaksanaan pembinaan Adiwiyata Sekolah.

Dalam pelaksanaan pembinaan Program Adiwiyata, Dinas Lingkungan Hidup tidak ada melakukan koordinasi atau bekerjasama dengan OPD lainnya. Seperti yang disampaikan oleh ibuk T. Masfetrin, S. Pt, M. Si selaku Kabid PK2L DLH Kota Padang sebagai berikut:

“...kami tidak ada berkoordinasi dengan OPD lainnya, dalam hal pembinaan adiwiyata, paling hanya ketika selesai penilaian, ngumpul sebentar mengenai hasil penilaian. (wawancara dengan ibuk T. Masfetrin, DLH Kota Padang. Pada tanggal 21 Maret 2018)”

Untuk membuktikan hal tersebut, maka peneliti menanyakan hal tersebut kepada pihak puskesmas, sebagai pihak dari OPD yang terkait yang melakukan pembinaan Program Adiwiyata. Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Neriwati, selaku penanggung jawab program Kesling Puskesmas Andalas Kota Padang, sebagai berikut:

“...kami berkoordinasi langsung dengan sekolah, karena ada program kesling dari puskesmas untuk sekolah, jadi sekaligus dengan pembinaan Adiwiyata. Namun kami tidak pernah mengikuti rapat koordinasi dengan DLH dan lain-lain, hanya dengan sekolah saja. ”(wawancara dengan ibuk Neriwati, Puskesmas Andalas, Padang Timur Kota Padang, pada tanggal 28 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa memang tidak ada rapat koordinasi dengan OPD lainnya yang di jadwalkan oleh DLH Kota Padang. Dan juga DLH Kota Padang tidak pernah melakukan koordinasi dengan OPD lainnya. Evaluasi terhadap pembinaan dilakukan hanya pada saat penilaian saja. Sehingga pada saat itulah dilibatkan OPD lainnya, melalui SK walikota. Namun tidak ada DLH membuat jadwal untuk rapat koordinasi dengan OPD lainnya, seperti yang disebutkan dalam tupoksi DLH pada Peraturan Walikota Padang No 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu staf dari LSM-WALHI yang merupakan salah satu anggota Tim Penilai Adiwiyata, sebagai berikut:

“selama saya ikut menjadi anggota tim penilai, belum ada saya diundang untuk rapat koordinasi oleh DLH. Yang ada itu hanya berkumpul untuk *briefing* sebelum penilaian sekaligus pembagian form penilaian, setelah itu berkumpul untuk menyampaikan hasil penilaian. Itu saja. Tidak ada rapat koordinasi” (wawancara dengan Febi Yulvia Erita, S. Pd, selaku staf dari LSM- WALHI Sumatera Barat pada tanggal 1 Agustus 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada rapat koordinasi yang dilakukan atau dijadwalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dengan OPD lainnya, termasuk dengan anggota tim Penilai Adiwiyata Kota Padang. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang tercantum dalam Perwako Kota Padang No 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, yaitu membuat jadwal rapat koordinasi dengan OPD untuk evaluasi pelaksanaan pembinaan Adiwiyata di sekolah. Bahkan, pihak dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri mengakui tidak ada berkoordinasi dengan OPD lainnya terkait Adiwiyata, kecuali hanya dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama selaku implementor Program Adiwiyata.

d. Melaporkan ke Walikota pelaksanaan pembinaan sekolah Adiwiyata.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tupoksi yaitu melaporkan pelaksanaan pembinaan sekolah Adiwiyata kepada Walikota. Hal ini juga diperjelas pada bagian lampiran peraturan Walikkota tersebut yaitu penyampaian laporan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak membuat laporan pelaksanaan pembinaan sekolah Adiwiyata. Laporan seringkali hanya berbasis aplikasi *Whatsapp*.

Hal ini diungkapkan oleh Ibuk T. Masfetrin, S. Pt, M. Si selaku Kabid PK2L DLH Kota Padang sebagai berikut:

“...selama ini laporan hanya pakai grup *Whatsapp* aja ya. Disitu ada semua pihak yang terlibat dalam Adiwiyata. kalau laporan tertulis kepada walikota itu nggak ada. Yang ada laporan kegiatan dari DLH saja tentang Adiwiyata, yang masih dalam proses pembuatan” (wawancara dengan ibuk T. Masfetrin, DLH Kota Padang, pada tanggal 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada laporan pembinaan yang dibuat oleh DLH kepada Walikota. Hal ini tentunya bertentangan dengan tugas DLH yang diatur dalam pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata bahwa DLH sebagai implementor Program Adiwiyata bertugas membuat laporan pelaksanaan pembinaan Adiwiyata kepada Walikota.

#### **5. 1. 2. 2 Dinas Pendidikan Kota Padang**

Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan bertugas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan hijau. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Padang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata. Untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, maka Dinas Pendidikan memberikan pembinaan kepada sekolah yang mengikuti program Adiwiyata. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara sebagai berikut:



“...dukungan penuh terhadap pelaksanaan Adiwiyata diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Dari Dinas Pendidikan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu sosialisasi, himbauan tertulis, dan memberi bantuan berupa sarana dan prasarana seperti tong sampah” (wawancara dengan bapak Indriyedi Bakri, S. Pd, MT selaku kasi penjaminan mutu dan pengawasan Dinas Pendidikan, tanggal 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang melaksanakan program Adiwiyata dalam bentuk pembinaan. Kegiatan pembinaan yang dilakukan berupa sosialisasi himbauan tetulis yang di tempelkan di mading-mading sekolah, serta pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana seperti tong sampah. Hal ini dibenarkan oleh salah satu sekolah Adiwiyata yang mendapat pembinaan dari Dinas Pendidikan Kota Padang, yaitu SDN 13 Nanggalo melalui wawancara sebagai berikut:

“...kalau dari Dinas Pendidikan itu ya ada tong sampah, itu masing-masing sekolah ada satu. Selain itu kadang ada yang datang memantau sekolah” (wawancara dengan bapak Marsal Maret S. Pd, tim Adiwiyata SDN 13 Nanggalo Kota Padang, pada tanggal 14 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sekolah mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan berupa tong sampah. Tong sampah diberikan satu paket tong sampah terpilah untuk setiap sekolah yang mengikuti program Adiwiyata. Selain itu, Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan atau monitoring ke sekolah, namun tidak memiliki jadwal yang pasti. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang, Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Dinas Pendidikan memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

1. Memasukkan muatan Adiwiyata ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.
2. Melakukan evaluasi sekali 6 (enam) bulan terhadap muatan yang diajarkan oleh guru.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut, peneliti menanyakan kegiatan yang mereka lakukan berdasarkan tupoksi dinas berdasarkan pedoman pelaksanaan program, dan peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“...muatan dalam kurikulum itu dari pihak sekolah saja, misalkan, pada satu mata pelajaran, diselipkan unsur lingkungannya, gitu aja. Itu bukan dari Dinas Pendidikan, kita hanya menyampaikan pada saat penyuluhan. Selebihnya itu tugas sekolah. Kalau untuk evaluasi kita tidak ada evaluasi, ya kalau kunjungan ke sekolah tidak hanya mengenai Adiwiyata saja, tapi tidak menentu jadwalnya. Karena sekarang bisa melalui *whatsapp* saja” (wawancara dengan bapak Indriyedi Bakri, S. Pd, MT selaku kasi penjaminan mutu dan pengawasan Dinas Pendidikan, tanggal 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan Adiwiyata tidak sejalan dengan tupoksinya. Seperti tidak mengambil andil dalam memasukkan muatan Adiwiyata ke dalam kurikulum, dan tidak melakukan evaluasi yang terjadwal. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan masih belum mematuhi pedoman pelaksanaan program yang ada.

### 5. 1. 2. 3 Kantor Kementerian Agama Kota Padang

Kementerian Agama Kota Padang sebagai sebuah instansi yang mengkhususkan diri pada bidang keagamaan, mengemban tugas penting dalam menyebarkan informasi dalam bidang keagamaan pada masyarakat luas. Keterlibatan Kemenag Kota Padang dalam program Adiwiyata yaitu dalam kegiatan pembinaan dan penilaian terhadap sekolah calon Adiwiyata. Pada Pedoman pelaksanaan Adiwiyata Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang tidak memiliki tupoksi khusus. Kemenag hanya dilibatkan dalam proses penilaian. Untuk pelaksanaan Program Adiwiyata, Kemenag Kota Padang tidak memiliki agenda khusus atau program khusus dalam pembinaan. Hal ini dapat peneliti buktikan dalam hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff Kemenag Kota Padang bagian Pendidikan Madrasah, sebagai berikut:

“...bagi kami program Adiwiyata ini merupakan program sukarela, karena tidak ada dianggarkan oleh Kemenag Kota Padang. Jadi tidak ada dalam rencana kegiatan program. Kegiatan yang dilakukan Kemenag sampingan aja, misalnya pada kunjungan ke Madrasah, kita tanya-tanya persiapan Adiwiyatanya”. (wawancara dengan Bapak Afri Moni, bagian Pengembang Sarana dan Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah. Pada tanggal 27 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa program Adiwiyata tidak ada dalam kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Kegiatan Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela saja, karena memang tidak ada anggaran khusus untuk program Adiwiyata. Dalam Perwako No 43 tahun 2016, Kemenag Kota Padang memang tidak ada mempunyai tupoksi khusus dalam implementasi Adiwiyata, namun kemenag dilibatkan dalam pembinaan dan penilaian program

Adiwiyata. Hal ini disebutkan dalam Perwako no 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, pasal 7 yang berbunyi “Tim Pembina Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri dari (a) Bapedalda, (b) Dinas Pendidikan, (c) Kementerian Agama Kota Padang”. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh Kemenag Kota Padang yaitu pemantauan pada setiap kali staf Kemenag melakukan peninjauan kepada madrasah.

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai tupoksi dari Kemenag di dalam kebijakan, maka tidak ada tuntutan terhadap pihak Kemenag untuk melakukan pembinaan rutin terhadap Madrasah. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Kemenag dalam Program Adiwiyata hanya pemantauan dan berupa ajakan kepada Madrasah untuk menjalankan Program Adiwiyata sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat edaran Walikota Padang. Selain itu, Kemenag juga berpartisipasi dalam kegiatan penilaian bersama dengan anggota tim Penilai lainnya yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Padang.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Program Adiwiyata oleh Kemenag Kota Padang tidak dianggarkan atau dilaksanakan secara khusus, namun menurut kepada hal yang dilakukan oleh DLH dan Dinas Pendidikan saja, artinya tidak ada kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenag kepada Sekolah Adiwiyata

#### 5. 1. 2. 4 Sekolah

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel 3 (tiga) sekolah, yaitu SDN 13 Nanggalo Kota Padang, SMPN 31 Kota Padang, dan MTsN Kuranji Kota Padang. Pemilihan ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang, sekolah memiliki tupoksi sebagai berikut:

- a) Mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan.
- b) Sekolah Adiwiyata Nasional membuat jadwal pembinaan sekolah calon Adiwiyata Kota (sekolah imbas) dan berkoordinasi dengan DLH.
- c) Sekolah Adiwiyata nasional wajib mendapatkan 10 sekolah binaan paling lambat satu bulan setelah penetapan Adiwiyata Nasional.
- d) Bagi sekolah dan penanggung jawab Adiwiyata propinsi dan nasional wajib mengikuti pelatihan/pembinaan/rapat koordinasi dengan DLH Provinsi Sumatera Barat.

Program Adiwiyata memiliki empat komponen yang dijadikan sebagai standar dari implementasi Adiwiyata disekolah. Sekolah dalam upaya mendapatkan penghargaan Adiwiyata mempunyai program dan kegiatan tersendiri. Sekolah harus berusaha dalam mengelola lingkungan agar menjadi bersih, dan juga membentuk karakter siswa nya agar peduli dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai tujuan

Adiwiyata, pihak sekolah melaksanakan kegiatan berdasarkan komponen-komponen Program Adiwiyata. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi:

a) Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Komponen kebijakan berwawasan lingkungan mempunyai standar, yaitu

1. Sekolah memiliki kurikulum yang memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan lingkungan hidup di sekolah berupa visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, sekolah harus memiliki struktur kurikulum yang memuat mata pelajaran wajib, muatan local, dan pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pada komponen mata pelajaran wajib atau muatan local atau pengembangan diri, yang memuat ketuntasan minimal belajar.

Pada sekolah Adiwiyata, sudah terdapat visi, misi dan tujuan yang memuat kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut peneliti dapatkan pada setiap sekolah yang peneliti jadikan sampel untuk melihat bagaimana implementasi Program Adiwiyata tersebut berjalan. Semua sekolah yang telah menjadi sekolah Adiwiyata memiliki visi dan misi yang memuat pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, setiap sekolah juga memiliki kurikulum mata pelajaran yang memuat unsur PLH, yang disertai dengan ketuntasan minimal belajar. Seperti contohnya materi

gotong royong dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan mengenal makhluk hidup dan lingkungan dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.

Pada tiga sekolah Adiwiyata Nasional yang telah peneliti amati dilapangan, peneliti menemukan visi dan misi sekolah yang memuat pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang peneliti rangkum pada tabel berikut:

**Tabel 5. 3**  
**Visi dan Misi Sekolah Adiwiyata Nasional**

	<b>SDN 13 Surau Gadang Nanggalo</b>	<b>SMPN 31 Andalas Kota Padang</b>	<b>MTsN 2 Kota Padang</b>
<b>Visi</b>	Unggul dalam prestasi, Agamis dan Menciptakan Lingkungan Sehat	Mewujudkan Warga Sekolah BerimtaW, IPTEK, Prestasi dan Berwawasan Lingkungan	Unggul dalam prestasi, Berkarakter Qur'ani, dan Berbudaya Lingkungan
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>2. Menanamkan budi pekerti sesuai adat dan agama.</li> <li>3. Mengembangkan kemampuan dasar.</li> <li>4. Mengembangkan sikap kritis, kreatif dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan.</li> <li>5. Mengembangkan dan membuat hasil karya daur ulang.</li> <li>6. Mengembangkan sikap peduli dan berbudaya lingkungan hidup dimanapun berada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dengan sepenuh hati</li> <li>2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan keagamaan</li> <li>3. Melaksanakan pembelajaran yang professional dan bermutu</li> <li>4. Mewujudkan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang efektif</li> <li>5. Mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter, berstandar internasional dan bebas dari pencemaran lingkungan</li> <li>6. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan</li> <li>7. Mewujudkan dan memanfaatkan kelestarian lingkungan sekolah yang bersih</li> <li>8. Melaksanakan pencegahan narkoba dan rokok dilingkungan sekolah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan kurikulum bercorak integrasi imtak-ipitek dan berbudaya lingkungan;</li> <li>2. Mewujudkan siswa yang religius dan memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik;</li> <li>3. Menerapkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan berbasis al-Qur'an dan berbudaya Minangkabau;</li> <li>4. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, penuh kasih sayang, dan menjadi teladan;</li> <li>5. Mewujudkan warga madrasah yang sadar dan peduli terhadap lingkungan yang asri, indah, nyaman, dan aman.</li> </ol>

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018*

2. Sekolah memiliki Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pada sekolah Adiwiyata memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi anggaran kesiswaan, anggaran kurikulum dan kegiatan pembelajaran, anggaran kapasitas pendidik dan kependidikan, anggaran sarana dan prasarana, anggaran budaya dan lingkungan sekolah, anggaran peran masyarakat dan kemitraan, dan anggaran peningkatan dan pengembangan mutu. Salah satu contoh sekolah yang telah mengalokasikan RKAS-nya sebanyak 22,07%, yaitu MTsN 2 Kota Padang, yang mengalokasikan dana untuk Adiwiyata sebanyak Rp. 273. 176. 000,- dari Rp. 1. 273. 991. 000,-.<sup>62</sup>

b) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, memiliki standar:

1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.

Standar ini meliputi bagaimana metode pembelajaran yang diberikan oleh pendidik, apakah ada isu-isu global dan isu lokal yang dijadikan sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup, rancangan pembelajaran yang tersusun dalam silabus kurikulum, melibatkan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program PLH, mengkomunikasikan hasil inovasi PLH dalam bentuk majalah dinding, bulletin, dan

---

<sup>62</sup>Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, MTsN 2 Kota Padang, Tahun 2016



lain-lain serta mengaitkan pengetahuan dalam pemecahan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar seperti, ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran lingkungan hidup, tenaga pendidik harus mampu mengembangkan isu lokal dan isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup. Adapun isu lokal dan isu global yang dijadikan materi pembelajaran lingkungan hidup yaitu mengenai Drainase atau saluran air, pemilahan sampah, pemanasan global, kantin sehat, pemborosan energi, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pelestarian fungsi lingkungan.<sup>63</sup>

Pelaksanaan pembelajaran lingkungan hidup harus mampu memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran, seperti hasil wawancara peneliti dengan Ketua Tim Adiwiyata SMPN 31 Andalas Kota Padang, sebagai berikut:

“...lingkungan menjadi media belajar seperti kolam ikan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan. Dalam kegiatan belajar, semua RPP kita sudah terintergrasi dengan pembelajaran lingkungan hidup” (wawancara dengan Ibu Nuraina selaku Ketua Tim Adiwiyata SMPN 31 Andalas, Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa, pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran telah dilaksanakan oleh sekolah Adiwiyata, selain itu, rencana pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik juga telah terintergrasi dengan Pendidikan Lingkungan Hidup, sehingga kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dapat lebih efektif diberikan kepada peserta didik.

---

<sup>63</sup>Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SDN 13 Surau Gadang Nanggalo, Kota Padang

Dalam pembelajaran lingkungan hidup, mengikutsertakan orang tua peserta didik dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti gotong royong dengan masyarakat dan Orang tua murid. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 5. 4**

**Kegiatan Gotong Royong Warga dan Wali Murid di SDN 13 Surau Gadang Nanggalo Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi SDN 13 Surau Gadang Nanggalo, Kota Padang, 2015*

Gambar diatas merupakan salah satu bentuk keterlibatan dari orang tua murid dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah. Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang warga sebagai berikut:

“...kami pernah melakukan gotong royong untuk membersihkan sekolah, yang kami bawa itu seperti pot bunga, membersihkan taman sekolah agar lebih bersih lagi, karena kalau hanya anak-anak yang membersihkan itu kan mereka belum tentu bisa, maklum saja lah mereka masih kecil-kecil. Jadi kami sebagai orang tua murid diundang oleh sekolah untuk gotong royong bersama-sama.” (wawancara dengan ibu Nuraina selaku warga masyarakat Nanggalo, pada tanggal 28 Agustus 2018)

Selanjutnya, hasil-hasil dari inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui media seperti majalah dinding, bulletin, dan lain-lain. Hasil inovasi dari siswa dapat berupa lukisan bertema lingkungan, artikel-artikel yang memuat pelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

**Gambar 5. 5**  
**Majalah Dinding MTsN 2 Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Padang, 2016*

Gambar diatas merupakan majalah dinding salah satu sekolah Adiwiyata Nasional, yaitu MTsN 2 Kota Padang.

2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peserta didik dapat menghasilkan karya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, yang dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. karya tersebut berupa bank sampah, toga, pengomposan, pengolahan limbah, dan lain lain.

**Gambar 5. 6**  
**Komposter SMPN 31 Andalas Kota Padang**



*Sumber: Data Primer, 2018*

Gambar diatas merupakan komposter di SMPN 31 Andalas Kota Padang yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah, yang dapat diolah langsung menjadi pupuk kompos.

**Gambar 5. 7**  
**Komposter SDN 13 Surau Gadang, Nanggalo Padang**



*Sumber: Data Primer, 2018*

Komposter merupakan salah satu sarana penunjang Program Adiwiyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup disekolah. Ketersediaan komposter bisa ditemukan hampir pada semua sekolah Adiwiyata. Namun, apakah sarana tersebut terpakai atau tidak merupakan salah satu permasalahan pada sekolah Adiwiyata. Banyaknya sarana yang ada pada setiap sekolah Adiwiyata, tetapi tidak semua sarana atau fasilitas tersebut digunakan, atau bahkan hanya menjadi symbol Adiwiyata saja. Seperti hal membuang sampah yang masih tidak pada tempatnya, meskipun telah disediakan tempat sampa, seperti yang terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 5. 8**  
**Sampah yang Berserakan Pada SMPN 31 Kota Padang**



*Sumber: Data Primer, 2018*

Foto tersebut peneliti ambil ketika peneliti melakukan observasi di SMPN 31 Andalas Kota Padang, pada saat itu sedang berlangsung kegiatan sosialisasi tentang Adiwiyata pada siswa baru sekolah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dari siswa untuk membuang sampah pada tempatnya.

c) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Komponen kegiatan partisipatif memiliki standar, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah.

2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain, orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, Dunia Usaha, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dan lain-lain.

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pemeliharaan gedung sekolah, pemanfaatan lahan sekolah sesuai dengan kaidah perlindungan lingkungan hidup, ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, adanya inovasi terkait lingkungan hidup dan mengikuti aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar. Contoh inovasi pembelajaran lingkungan hidup yaitu seperti majalah dinding, tanama obat keluarga (toga), biopori, komposter, kantin kejujuran, dan lain-lain.

Berikut contoh hasil karya siswa, yang memanfaatkan barang-barang bekas:

**Gambar 5. 9**  
**Hasil karya siswa MTsN 2 Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Padang, 2016*

Gambar diatas merupakan salah satu contoh hasil karya siswa yang memanfaatkan kantong plastik bekas, menjadi sebuah karya seni berbentuk bunga. Untuk kegiatan lain yang merupakan contoh dari kegiatan yang berbasis partisipatif yang dilaksanakan sekolah Adiwiyata, dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini:

“...contoh kegiatan partisipatif itu yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sekolah, seperti melibatkan masyarakat sebagai anggota komite sekolah, menerima bantuan dari orang tua dan alumni, serta melakukan aksi yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan seperti memilah sampah sambil melakukan gerak jalan dalam aksi lingkungan dalam rangka hari ulang tahun sekolah” (wawancara dengan ibu Nuraina, selaku Ketua Tim Adiwiyata SMPN 31 Andalas Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan berbasis partisipatif dapat berupa melibatkan masyarakat dan melakukan aksi bersih lingkungan bersama masyarakat.

#### d) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar, sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.

Sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, seperti: Gedung sekolah yang bersih dan nyaman, Ruang kelas yang mencukupi, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang operator, ruang dapur, mushola, perpustakaan, dan UKS. Hal tersebut merupakan sarana dan prasarana wajib yang ada disekolah. Selain sarana dan prasarana wajib, terdapat sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, yang



dapat membantu pelestarian lingkungan, dan mencegah dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga mencerminkan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah Adiwiyata. Sarana dan prasarana tersebut antara lain; Bank sampah, tempat sampah terpilah yang ada pada masing-masing ruang kelas, komposter, kolam ikan, taman sekolah, hutan sekolah, *Green House*, visi misi sekolah yang di publikasikan di sekolah tersebut, halaman sekolah yang hijau dan bebas dari sampah, hidroponik dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Adanya sarana dan prasarana yang ramah lingkungan disekolah diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap perilaku siswa sehingga lebih mencintai lingkungannya. seperti hasil wawancara dengan salah satu tim Adiwiyata sekolah, sebagai berikut:

“...kami memiliki sarana dan prasana penunjang program Adiwiyata, seperti tong sampah terpilah yang terletak pada setiap kelas, *green house*, komposter, gazebo, dan masih banyak lagi, semua di sediakan dengan usaha sekolah dan dibantu oleh beberapa pihak, seperti orang tua murid, DLH dan Dinas Pendidikan” (wawancara dengan bapak Marsal Maret, S. Pd sebagai operator dan tim Adiwiyata SDN 13 Nanggalo kota Padang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sekolah memiliki sarana dan prasarana yang diadakan sendiri maupun dengan bantuan dari pihak luar sekolah. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 5. 10**  
**Halaman Sekolah SMPN 31 Andalas Kota Padang**



*Sumber: Data Primer, 2018*

Pada gambar tersebut dapat kita lihat halaman sekolah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan hijau, dan bersih lingkungannya. selain halaman sekolah, pada tiap sekolah Adiwiyata juga harus ada visi dan misi sekolah yang di publikasikan pada halaman atau bagian depan sekolah, seperti pada gambar berikut:

**Gambar 5. 11**  
**Visi dan Misi SMPN 31 Andalas Kota Padang**



*Sumber: Data Primer, 2018*

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai belum dapat dijadikan indikator bahwa warga sekolah telah patuh, dan mampu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Seperti pada gambar dibawah ini:

**Gambar 5. 12**  
**Kondisi Tempat Sampah yang Disediakan Pada Setiap Kelas di SMPN 31 Kota Padang**



*Sumber: Data Primer, 2018*

Pada gambar diatas, dapat dilihat kondisi tempat sampah dan masih ada terdapat sampah plastik yang berada diluar tempat sampah tersebut. Dari kondisinya, terlihat tempat sampah tidak terawat dan belum termanfaatkan dengan baik.

Selain mempunyai sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, sekolah Adiwiyata Nasional, wajib membuat jadwal koordinasi dengan sekolah imbas, dan berkoordinasi dengan DLH. Dalam hal ini, sekolah Adiwiyata Nasional wajib memiliki minimal 10 sekolah imbas. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata Nasional wajib membina sekolah lainnya sampai menjadi Sekolah Adiwiyata Kota. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Adiwiyata SDN 13 Nanggalo Kota Padang sebagai berikut:

“...pada tahun 2017 kami memiliki 10 sekolah binaan, namun karena ada peraturan baru dari DLH, sekolah binaan sekarang paling banyak yaitu 5 sekolah”. (wawancara dengan Bapak Marsal Maret, S. Pd sebagai operator Tim Adiwiyata SDN 13 Nanggalo Kota Padang, pada tanggal 14 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sekolah memiliki sekolah binaan, sebagai salah satu syarat untuk menjadi sekolah Adiwiyata mandiri. Dalam menjalankan program Adiwiyata.

Pelaksanaan komponen Adiwiyata pada sekolah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 4**  
**Pelaksanaan Komponen Adiwiyata Pada Sekolah Adiwiyata**

KEGIATAN				
1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan				
Standar	Implementasi	Pencapaian Sekolah		
		SDN. 13 Surau Gadang Nanggalo	SMP N 31 Andalas Kota Padang	MTsN 02 Kuranji Kota Padang
1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Visi: Unggul dalam prestasi, Agamis dan Menciptakan Lingkungan Sehat  Misi: 7. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Menanamkan budi pekerti sesuai adat dan agama. 9. Mengembangkan kemampuan dasar. 10. Mengembangkan sikap	Visi: Mewujudkan Warga Sekolah Berimtaf, IPTEK, Prestasi dan Berwawasan Lingkungan  Misi: 9. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dengan sepenuh hati 10. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan keagamaan 11. Melaksanakan pembelajaran yang professional dan bermutu	Visi: Unggul dalam prestasi, Berkarakter Qur'ani, dan Berbudaya Lingkungan  Misi: 6. Menerapkan kurikulum bercorak integrasi imtak-iptek dan berbudaya lingkungan; 7. Mewujudkan siswa yang religius dan memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik;

		<p>kritis, kreatif dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan.</p> <p>11. Mengembangkan dan membuat hasil karya daur ulang.</p> <p>12. Mengembangkan sikap peduli dan berbudaya lingkungan hidup dimanapun berada.</p>	<p>12. Mewujudkan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang efektif</p> <p>13. Mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter, berstandar internasional dan bebas dari pencemaran lingkungan</p> <p>14. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan</p> <p>15. Mewujudkan dan memanfaatkan kelestarian lingkungan sekolah yang bersih</p> <p>16. Melaksanakan pencegahan narkoba dan rokok di lingkungan sekolah</p>	<p>8. Menerapkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan berbasis al-Qur'an dan berbudaya Minangkabau;</p> <p>9. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, penuh kasih sayang, dan menjadi teladan;</p> <p>10. Mewujudkan warga madrasah yang sadar dan peduli terhadap lingkungan yang asri, indah, nyaman, dan aman.</p>
<p>b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>		<p>1. Pendidikan Agama</p> <p>2. Bahasa Indonesia</p> <p>3. Matematika</p> <p>4. Ilmu Pengetahuan Alam</p> <p>5. Ilmu Pengetahuan Sosial</p> <p>6. Seni Budaya dan Keterampilan</p> <p>7. Pendidikan Kewarganegaraan</p> <p>8. Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan</p> <p>Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada 3</p>	<p>Struktur kurikulum sudah memuat pembelajaran lingkungan hidup, RPP telah terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup</p>	<p>1. Akidah Akhlak</p> <p>2. Fiqih</p> <p>3. Qur'an Hadits</p> <p>4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)</p> <p>5. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)</p> <p>6. Bahasa Arab</p> <p>7. Bahasa Indonesia</p> <p>8. Bahasa Inggris</p> <p>9. Matematika</p> <p>10. IPA-Biologi</p> <p>11. IPA-Fisika</p> <p>12. IPS</p> <p>13. Seni Budaya</p> <p>14. Penjaskes</p> <p>15. TIK</p>

		(tiga) komponen.		16. PLH
	c. Mata Pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar.	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan LH	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan LH	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan LH
17.RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,meliputi kesiswaan,kurikulum dan kegiatan pembelajaran,peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga	RKAS sudah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu meliputi 1. Anggaran kesiswaan, 2. Anggaran kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 3. Anggaran kapasitas pendidik dan kependidikan, 4. Anggaran sarana dan prasarana 5. Anggaran budaya lingkungan sekolah, 6. Anggaran peran masyarakat dan kemitraan 7. Anggaran peningkatan dan pengembangan mutu	RKAS sudah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu meliputi 1. Anggaran kesiswaan, 2. Anggaran kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 3. Anggaran kapasitas pendidik dan kependidikan, 4. Anggaran sarana dan prasarana 5. Anggaran budaya lingkungan sekolah, 6. Anggaran peran masyarakat dan kemitraan 7. Anggaran peningkatan dan pengembangan mutu	RKAS sudah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu meliputi 1. Anggaran kesiswaan, 2. Anggaran kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 3. Anggaran kapasitas pendidik dan kependidikan, 4. Anggaran sarana dan prasarana 5. Anggaran budaya lingkungan sekolah, 6. Anggaran peran masyarakat dan kemitraan 7. Anggaran peningkatan dan pengembangan mutu
<b>2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan</b>				
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.	a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran.	Sudah melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi kelompok, observasi lapangan, dan penugasan.	Sudah melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi kelompok, observasi lapangan, dan penugasan.	Sudah melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi kelompok, observasi lapangan, dan penugasan.

	b. Mengembangkan isu lokal dan/atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan.	Sudah mengembangkan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup, adapun isu yang dapat dikaji seperti, sampah, air, energy, makanan kantin, dan keanekaragaman hayati	Sudah mengembangkan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup, adapun isu yang dapat dikaji seperti, sampah, air, energy, makanan kantin, dan keanekaragaman hayati	Sudah mengembangkan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup, adapun isu yang dapat dikaji seperti, sampah, air, energy, makanan kantin, dan keanekaragaman hayati
	c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup.	Sudah mengembangkan indikator dan instrument penilaian PLH, berupa penilaian terhadap kondisi lingkungan sekitar.	Sudah mengembangkan indikator dan instrument penilaian PLH, berupa penilaian terhadap kondisi lingkungan sekitar.	Sudah mengembangkan indikator dan instrument penilaian PLH, berupa penilaian terhadap kondisi lingkungan sekitar.
	d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun di luar kelas.	Semua rancangan pembelajaran sudah tersusun dalam silabus kurikulum	Semua rancangan pembelajaran sudah tersusun dalam silabus kurikulum	Semua rancangan pembelajaran sudah tersusun dalam silabus kurikulum
	e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup.	Sudah mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pendidikan lingkungan hidup seperti dengan cara goro bersama, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat terkait dengan program Adiwiyata.	Sudah mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pendidikan lingkungan hidup seperti dengan cara goro bersama, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat terkait dengan program Adiwiyata.	Sudah mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pendidikan lingkungan hidup seperti dengan cara goro bersama, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat terkait dengan program Adiwiyata.
	f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup.	Peserta didik sudah menngkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui majalah dinding, buletin sekolah,	Peserta didik sudah menngkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui majalah dinding, buletin sekolah,	Peserta didik sudah menngkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui majalah dinding, buletin sekolah,
	g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam	Peserta didik sudah mampu memecahkan masalah lingkungan hidup dalam	Peserta didik sudah mampu memecahkan masalah lingkungan hidup dalam	Peserta didik sudah mampu memecahkan masalah lingkungan hidup dalam



	pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari	kehidupan sehari-hari	kehidupan sehari-hari	kehidupan sehari-hari
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Menghasilkan karya nyata seperti komposter. <i>Green House</i> , tanaman TOGA, taman sekolah, bank sampah, dan lain – lain	Menghasilkan karya yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan seperti taman sekolah, kolam, hutan sekolah, kebun, <i>Green House</i> , komposter, taman hidroponik, dan lain-lain	Menghasilkan karya nyata seperti komposter. <i>Green House</i> , tanaman TOGA, taman sekolah, bank sampah, dan lain – lain
	b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang di peroleh untuk memecahan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.	Sudah menerapkan pengetahuan lingkungan hidup untuk pemecahan masalah lingkungan hidup	Sudah menerapkan pengetahuan lingkungan hidup untuk pemecahan masalah lingkungan hidup	Sudah menerapkan pengetahuan lingkungan hidup untuk pemecahan masalah lingkungan hidup
	c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media.	Mengkomunikasikan hasil belajar melalui majalah dinding, bulletin sekolah.	Mengkomunikasikan hasil belajar melalui majalah dinding	Mengkomunikasikan hasil belajar melalui majalah dinding
<b>3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif</b>				
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah.	a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah.	Sudah memelihara dan merawat lingkungan sekolah	Sudah memelihara dan merawat lingkungan sekolah	Sudah memelihara dan merawat lingkungan sekolah
	b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Sudah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup	Sudah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup	Sudah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup
	c. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan	UKS, dan Pramuka,	UKS dan pramuka	UKS dan Pramuka

	pengelola lingkungan hidup.			
	d. Adanya kreatifitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Komposter, daur ulang	Daur ulang, komposter, taman sekolah	Daur ulang, komposter, taman sekolah
	e. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.	Gotong royong bersama warga masyarakat, tingkat RW	Aksi lingkungan dengan bejalan santai dan memungut sampah	Jum'at bersih, yaitu membersihkan lingkungan sekitar sekolah
2. Menjalinkan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain : orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.	a. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup, 3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.	Menjalinkan kerjasama dengan puskesmas, Universitas Bung Hatta, Masyarakat dan orang tua murid	Menjalinkan kerjasama dengan puskesmas, masyarakat dan orang tua murid	Menjalinkan kerjasama dengan puskesmas, masyarakat dan orang tua murid
	b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Memperoleh bantuan dana dan sarana dari orang tua murid dan masyarakat sekitar, seperti tanaman bunga	Memperoleh bantuan dana dan sarana dari orang tua murid dan masyarakat sekitar, seperti tanaman bunga	Memperoleh bantuan dana dan sarana dari orang tua murid dan masyarakat sekitar, seperti tanaman bunga
	c. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Menjalinkan kemitraan dengan Puskesmas	Menjalinkan kemitraan dengan Puskesmas	Menjalinkan kemitraan dengan Puskesmas
	d. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan	Melakukan sosialisasi kepada sekolah binaan, dan pembinaan kepada sekolah	Melakukan sosialisasi kepada sekolah binaan, dan pembinaan kepada sekolah	Melakukan sosialisasi kepada sekolah binaan, dan pembinaan kepada sekolah

	hidup.	binaan tersebut	binaan tersebut	binaan tersebut
	e. Memberi dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Memberikan bantuan kepada sekolah binaan terkait dengan pengetahuan mengenai lingkungan hidup	Memberikan bantuan kepada sekolah binaan terkait dengan pengetahuan mengenai lingkungan hidup	Memberikan bantuan kepada sekolah binaan terkait dengan pengetahuan mengenai lingkungan hidup
<b>4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan</b>				
1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan.	a. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah.	Sarana dan prasarana seperti halaman sekolah, <i>Green House</i> , biopori, sumur resapan, komposter	Sarana dan prasarana seperti halaman sekolah, <i>Green House</i> , biopori, sumur resapan, komposter	Sarana dan prasarana seperti halaman sekolah, <i>Green House</i> , biopori, sumur resapan, komposter
	b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.	Toga, tumbuh-tumbuhan, hutan sekolah	Kolam ikan, tumbuh-tumbuhan, taman sekolah, kebun sayuran	Kolam ikan, tumbuh-tumbuhan, taman sekolah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	a. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan.	Gotong royong membersihkan gedung dan halaman sekolah	Gotong royong membersihkan gedung dan halaman sekolah	Gotong royong membersihkan gedung dan halaman sekolah
	b. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah.	Membersihkan saluran air, pembuangan limbah	Membersihkan saluran air, pembuangan limbah	Membersihkan saluran air, pembuangan limbah
	c. Memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien.	Memberikan slogan pada setiap sarana dan prasarana, seperti hemat air, hemat listrik dan lain-lain	Memberikan slogan pada setiap sarana dan prasarana, seperti hemat air, hemat listrik dan lain-lain	Memberikan slogan pada setiap sarana dan prasarana, seperti hemat air, hemat listrik dan lain-lain
	d. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan.	Tidak memakai kantong plastik atau wadah plastik untuk makanan, menyediakan makanan yang sehat dan higienis	Pengelolaan kantin oleh Dharma Wanita, dan telah diuji oleh BPOM	Tidak memakai kantong plastik atau wadah plastik untuk makanan, menyediakan makanan yang sehat dan higienis

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam pelaksanaan program Adiwiyata. Selain kegiatan tersebut, sekolah yang telah menjadi sekolah Adiwiyata Nasional melakukan pembinaan kepada sekolah imbasnya. Pembinaan yang dilakukan oleh sekolah Adiwiyata Nasional terhadap sekolah imbas nya nanti akan menjadi komponen penilaian untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri.

**Gambar 5. 13**  
**Kegiatan Pembinaan Oleh SDN 13 Surau Gadang Kepada SD Sabbihisma 2**  
**Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi SDN 13 Surau Gadang Nanggalo*

Gambar diatas merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh SDN 13 Surau Gadang Nanggalo terhadap sekolah imbasnya, yaitu SD Sabbihisma Kota Padang. Terlihat adanya alat peraga berupa tong sampah yang diperlihatkan kepada siswa-siswi SD Sabbihisma Kota Padang. Pembinaan kepada sekolah dilakukan atas

perjanjian yang dibuat antara Sekolah Pembina dengan sekolah binaan, seperti contoh surat perjanjian yang akan peneliti lampirkan pada bagian lampiran skripsi ini.

Pada bagian ini, peneliti mencoba menjelaskan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Adiwiyata pada masing-masing sekolah yang menjadi objek dan lokasi penelitian ini.

### **1. SDN 13 Surau Gadang Nanggalo**

Pelaksanaan Adiwiyata pada SDN 13 Surau Gadang dimulai dari tahun 2014 mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat kota, pada tahun 2015 menjadi sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan pada tahun 2016 menjadi sekolah Adiwiyata Nasional. Pada tahun 2018, direncanakan SDN 13 Surau Gadang akan mengikuti penilaian untuk menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Dalam melaksanakan program Adiwiyata, SDN 13 Surau Gadang Nanggalo melaksanakan komponen-komponen Adiwiyata. Seperti menciptakan kebijakan-kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan.

Dalam menciptakan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan yaitu dimulai dari perumusan visi dan misi sekolah yang berwawasan lingkungan. SDN 13 Surau Gadang memiliki visi yaitu “Unggul dalam Prestasi, Agamis dan Menciptakan Lingkungan Sehat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, SDN 13 Surau Gadang mempunyai misi, seperti yang telah peneliti jelaskan pada tabel 5. 4 tentang pelaksanaan komponen Adiwiyata pada sekolah Adiwiyata. Selain kebijakan berupa visi dan misi sekolah, SDN 13 Surau Gadang juga melaksanakan kurikulum yang

berbasis lingkungan, dengan mengintergrasikan masalah dan upaya perlindungan lingkungan hidup, hal tersebut tertuang dalam susunan kurikulum yang akan diajarkan oleh guru pada setiap mata pelajaran yang akan diajarkan. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan juga dapat dilakukan dengan menjadikan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran yang efektif, seperti mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan, kolam, dan lain-lain. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan dapat dijadikan salah satu media untuk mengenalkan makhluk hidup dan lingkungan yang harus dilestarikan kepada murid. Khususnya murid pada jenjang sekolah dasar, penanaman sikap peduli lingkungan harus dilakukan sejak dini, terutama di lingkungan sekolahnya, sehingga dapat membiasakan diri nantinya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam bentuk kegiatan peduli lingkungan yang bersifat partisipatif, SDN 13 Surau Gadang mengadakan kegiatan gotong royong yang dilakukan bersama dengan warga dan orang tua murid. Keikutsertaan orang tua murid dalam kegiatan sekolah merupakan salah satu bentuk partisipasi dari orang tua murid, dalam membantu merawat dan membersihkan lingkungan sekolah. Hal ini merupakan bentuk dari adanya hubungan dan komunikasi yang baik yang terjalin antara guru dan orang tua murid. Selain dengan orang tua, sekolah juga diharuskan menjalin bentuk kerjasama dengan pihak luar sekolah, seperti puskesmas, dan pihak swasta atau perguruan tinggi. Dalam hal ini, SDN 13 Surau Gadang melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas dalam program UKS dan menjalin kerjasama dengan Universitas Bung Hatta dalam hal pengadaan Bank Sampah.

Salah satu kriteria sekolah Adiwiyata adalah memiliki sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Berikut adalah sarana dan prasarana sebagai bentuk kontribusi sekolah terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekolah;

**Tabel 5. 5**  
**Data Kontribusi Sekolah Terhadap Pengelolaan LH di Sekolah**

Nama Sekolah	: SDN 13 Surau Gadang
Alamat Sekolah	: Jl. Widuri Siteba
Nomor Telp/Fax	: (0751) 40313
Jumlah Peserta Didik	: 383 murid
Jumlah Tenaga Kependidikan	: 19 orang
Jumlah Tenaga Non Kependidikan	: 5 orang
Jumlah Pembina Adiwiyata	: 10 orang
Jumlah Sampah yang Ditimbulkan	: 1 kg/hari
Jumlah Sampah yang Diolah Menjadi Kegiatan 3R	: 0,5 kg/hari
Produksi Kompos Padat	: 1 kg/bulan
Produksi Kompos Cair	: 1 kg/bulan
Jumlah Biopori	: 6 buah
Jumlah Sumur Resapan	: 1 sumur
Jumlah Tanaman Penghijauan 3 tahun terakhir *) Penghijauan yang dilakukan di lingkungan di dalam dan di luar lingkungan sekolah	: 2013 = 90 pohon : 2014 = 82 pohon : 2015 = 60 pohon
Jenis Tanaman Keras yang Dimiliki di Lingkungan Sekolah	: 1. Pohon Pinang 8 tahun 3 pohon 2. Pohon Mangga 8 tahun 2 phon 3. Pohon Nangka 7 tahun 3 pohon 4. Pohon Belimbing 7 tahun 1 pohon 5. Pucuk Merah 4 tahun 30 pohon

*Sumber: Data SDN 13 Surau Gadang, 2017*

## 2. SMPN 31 Andalas Kota Padang

Pelaksanaan Adiwiyata di SMPN 31 Kota Padang dimulai dari tahun 2014 sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kota, 2015 sebagai sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, dan 2016 sebagai sekolah Adiwiyata tingkat nasional, sama halnya dengan SDN 13 Surau Gadang, SMPN 31 Kota Padang juga dalam tahap pembinaan Adiwiyata menuju sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2018. Dalam pelaksanaan

komponen Adiwiyata, SMPN 31 Kota Padang memiliki visi yaitu “Mewujudkan warga sekolah berimtaq, IPTEK, Prestasi dan Berwawasan Lingkungan” untuk mencapai visi tersebut, terdapat beberapa misi, yang salah satu diantaranya adalah mewujudkan dan memanfaatkan kelestarian lingkungan sekolah yang bersih. Dari visi dan misi tersebut, dapat kita lihat bahwa telah ada komitmen dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di sekolah tersebut. Untuk menunjang pelaksanaan komponen Adiwiyata di sekolah, karena adanya keterbatasan dana, maka salah satu inovasi kebijakan dari sekolah adalah dengan adanya infak untuk kegiatan Adiwiyata, yang berupa iuran dari siswa-siswi yang dikhususkan untuk sarana dan prasarana kegiatan Adiwiyata di sekolah.

Selain kebijakan sekolah, pada komponen selanjutnya adalah penerapan kurikulum yang berbasis lingkungan. Kurikulum yang diajarkan kepada siswa harus terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan pencegahan pengrusakan lingkungan hidup. pada tingkat sekolah menengah terdapat kesulitan dalam menerapkan hidup bersih dan cinta lingkungan, sulit untuk menerapkan perilaku hidup bersih seperti hanya membuang sampah pada tempatnya. Berbeda dengan sekolah Adiwiyata yang seharusnya, murid-murid harus mampu membedakan jenis sampah organik dan anorganik, dan mengerti proses daur ulang sampah menjadi suatu benda yang berguna.

Pada komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, SMPN 31 melakukan kegiatan tahunan seperti jalan santai sambil membersihkan lingkungan sekitar. Selain itu terdapat juga kegiatan gotong royong yang melibatkan warga sekitar sekolah untuk membersihkan lingkungan. Partisipasi dari orang tua murid juga



dapat berupa materi, sebagai donator dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung Adiwiyata.

Komponen yang terakhir yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan juga merupakan salah satu komponen dari program Adiwiyata, sekolah diwajibkan memiliki sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, melestarikan lingkungan dan pengelolaan sarana dan prasarana disekolah juga termasuk dalam penilaian. Pada umumnya, semua sekolah Adiwiyata memiliki sarana dan prasarana ramah lingkungan, seperti tempat sampah terpilah, komposter, bank sampah, kolam ikan, taman, tanaman hidroponik, toga, kebun sekolah dan hutan sekolah. tiap sekolah diwajibkan memiliki pohon pelindung atau pohon besar.

### **3. MTsN 2 Kuranji Kota Padang**

Pelaksanaan program Adiwiyata di MTsN 2 Kota Padang dimulai dari tahun 2014 menjadi Adiwiyata tingkat kota, tahun 2015 menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, pada tahun 2016 menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional, dan pada tahun 2017 menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Pelaksanaan kebijakan sekolah berupa penerapan visi dan misi yang berwawasan lingkungan, adapun visi dari MTsN 2 Kota Padang adalah “Unngu dalam prestasi, Berkarakter Qur’ani dan Berbudaya Lingkungan”, adapun misi dalam mewujudkan visi sekolah yang berbudaya lingkungan yaitu menerapkan kurikulum bercorak integrasi imtak-ipitek dan berbudaya lingkungan, dan mewujudkan warga madrasah yang sadar dan peduli terhadap lingkungan yang asri, indah, nyaman dan aman.

Sebelum menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri, MTsN 2 Kota Padang terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah imbasnya. Pembinaan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar sekolah tersebut dapat menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh sekolah terhadap sekolah imbasnya dapat dibuktikan melalui absensi atau daftar hadir pembinaan terhadap sekolah imbas, seperti gambar berikut ini:

**Gambar 5. 14**  
**Daftar Hadir Pembinaan oleh MTsN 2 Kota Padang**

Jalan Raya Durian Tarung Kel. Pasar Ambacang Kec. Kurangi Telp 0751-72707  
e-mail :

**DAFTAR HADIR SEKOLAH BINAAN  
DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS ADIWIYATA 2017  
DI MTsN DURIAN TARUNG KOTA PADANG  
SELASA / 13 DESEMBER 2016**

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA	JABATAN	NO. TELP	TANDA TANGAN
1	SDN 06 Ps. Ambacang	ZURHATI, S.Pd	Guru	08126782498	[Signature]
2	SDN 17 Ps. Ambacang				
3	SDN 23 Ps. Ambacang				
4	SDN 31 Ps. Ambacang				
5	SDN 23 Ampalu	ASISI S.Pd	Secretaris	081363410600	[Signature]
		MARIA ULFAH	operator	081374167522	[Signature]
6.	SD Islam Khaira Ummah	Dewi Hanta	kaha	08137479804	[Signature]
		Deski Nora Nazar	sekretaris	08527208072	[Signature]
7	SDN 36 Alang Lawas	Mira Halyah, S.Pd	Guru	085774430968	[Signature]
		Muriarti, S.Pd	Operator	085263638251	[Signature]
8	SDN 20 Alang Lawas	Anita, S.Pd	KETUA	089274082429	[Signature]
		Jonni Perawati, SE	operator	082170074861	[Signature]
9	SDN 37 Alang Lawas	STAMSUAENI	KETUA	08566893848	[Signature]
		TRISKA DEWI	Operator	081363262646	[Signature]
10	SDN 01 Alang Lawas	MAIDAR	Guru	081270390761	[Signature]
		SEPTIUS MITRA .W	operator	085263091321	[Signature]

Sumber: Dokumen Adiwiyata MTsN 2 Kota Padang, 2017

Gambar 5. 14 diatas merupakan daftar hadir dari sekolah binaan pada kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh MTsN 2 Kota Padang. Dengan adanya daftar hadir tersebut, maka dapat menjadi bukti bahwa adanya pembinaan yang dilakukan oleh MTsN 2 Kota Padang terhadap sekolah-sekolah binaan atau sekolah imbasnya.

Berdasarkan data dan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sekolah terhadap tupoksinya yang ada pada Peraturan Walikota Padang no 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata telah melaksanakan kewajibannya sebagai sekolah Adiwiyata, yaitu mempunyai sarana dan prasarana ramah lingkungan, dan melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah imbasnya.

## **5.2 *What's Happening* (Apa Yang Terjadi)**

Pendekatan ini menanyakan bagaimana implementasi berjalan, tujuan yang sedang dicapai, bagaimana keberhasilan implementasi dilandasi dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Terkait dengan variabel ini, penelitian Implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang yang peneliti lakukan ingin melihat bagaimana implementasi berjalan, siapakah implementornya, bagaimana sejumlah sumber digunakan selama implementasi berlangsung, dan hambatan-hambatan apa yang timbul saat implementasi program Adiwiyata.

Variabel *What's Happening* terbagi atas lima indikator, agar dapat mengukur pelaksanaan suatu program. Yang akan peneliti jelaskan pada bagian dibawah ini, yaitu:

### 5.2.1 Banyaknya Aktor yang Terlibat (*The Profusion of Actors*)

Indikator ini menjelaskan bahwa proses implementasi tidak hanya melibatkan satu aktor saja, melainkan banyak aktor. Implementor yang terlibat dalam implementasi suatu program tidak hanya yang ada pada ruang lingkup pemerintahan dan birokrat, namun juga melibatkan aktor diluar pemerintahan seperti organisasi non pemerintah yang disebutkan sebagai pihak yang berkepentingan.

Untuk menjelaskan indikator ini, Ripley juga menurunkannya menjadi beberapa konsep, yaitu :

#### 5. 2. 1. 1 Jumlah dan Identitas (*Number and Identity*)

Dalam indikator ini, *number* dijelaskan sebagai siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi atau berapa banyak aktor yang terlibat. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, implementor yang terlibat yaitu lebih kurang sebanyak 6 Instansi di Kota Padang, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru. Untuk tabel aktor yang terlibat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 6**  
**Implementor Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang**

No.	Instansi	Bidang
1.	Dinas Lingkungan Hidup	PK2L (Pengembangan Kelembagaan dan Komunikasi Lingkungan)
2.	Dinas Pendidikan	Seksi Penjamin Mutu dan Pengawasan
3.	Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Pengembang Sarana dan Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah
4.	Sekolah	1. SDN 13 Nanggalo 2. SMPN 31 Andalas 3. MTsN Durian Tarung
5.	Guru	1. SDN 13 Nanggalo 2. SMPN 31 Andalas 3. MTsN Durian Tarung
6.	Kepala Sekolah	1. SDN 13 Nanggalo 2. SMPN 31 Andalas 3. MTsN Durian Tarung

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018*

Dari Tabel 5. 4 diatas dapat dilihat banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang, dimana aktor yang terlibat tersebut sesuai dengan tugas yang ada dalam peraturan Walikota No 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Sedangkan *Identity* mengacu pada kedudukan (Tupoksi) implementor dalam suatu program. Dimana tupoksi masing-masing implementor telah tercantum dalam peraturan Walikota No 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Instansi memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidang dan wilayah kerjanya. Yang akan dilihat pada penelitian ini adalah bagaimana implementor yang terlibat melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam peraturan Walikota No 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata terkait tujuan Adiwiyata yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan

nyaman serta berwawasan lingkungan. Dimana tugas dari implementor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 7**  
**Tugas Pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang**

No.	Pelaksana/ Implementor	Bidang Kegiatan	Tugas
1.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang	Pembinaan Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan calon sekolah adiwiyata, penanggung jawab Adiwiyata dan operator aplikasi Adiwiyata untuk ditetapkan oleh Walikota.</li> <li>b. Melakukan pembinaan/pelatihan kepada operator aplikasi Adiwiyata paling lambat (2) bulan setelah diumumkan sekolah Adiwiyata Nasional</li> <li>c. Membuat jadwal rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk evaluasi pelaksanaan pembinaan ke sekolah</li> <li>d. Melaporkan ke Walikota perkembangan pelaksanaan pembinaan sekolah</li> </ul>
2.	Dinas Pendidikan	Pembinaan Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memasukkan muatan Adiwiyata kedalam kurikulum tingkat satuan pendidikan</li> <li>b. Melakukan evaluasi sekali 6 (enam) bulan terhadap muatan Adiwiyata yang diajarkan oleh guru</li> </ul>
3.	Guru	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup</li> <li>b. Memasukkan muatan Adiwiyata dalam kurikulum</li> </ul>
4.	Sekolah	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan</li> <li>b. Sekolah Adiwiyata nasional membuat jadwal pembinaan sekolah calon Adiwiyata kota (sekolah imbas) dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>c. Sekolah Adiwiyata Nasional</li> </ul>

			<p>wajib mendapatkan 10 (sepuluh) sekolah binaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Sekolah Adiwiyata nasional</p> <p>d. Bagi sekolah dan penanggung jawab Adiwiyata propinsi dan nasional wajib mengikuti pelatihan/ pembinaan/ rapat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.</p>
5.	Kepala Sekolah	Pembinaan	<p>a. Mengikuti pembinaan/pelatihan yang dilaksanakan oleh Pembina Adiwiyata</p> <p>b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Adiwiyata setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>c. Menetapkan satu orang penanggungjawab Adiwiyata dan dua orang tenaga operasional aplikasi Adiwiyata</p> <p>d. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang memuat program upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>e. Membuat Standar Operasional Prosedur pencapaian Adiwiyata</p>
6.	Kementerian Agama	Pembinaan Penilaian	<p>a. Sosialisasi pedoman Adiwiyata</p> <p>b. Bimbingan teknis kepada tim Adiwiyata</p> <p>c. Pembentukan sekolah model</p> <p>d. Pendampingan terhadap sekolah</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi program</p> <p>f. Penyusunan laporan pembinaan</p> <p>g. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan sekolah Adiwiyata</p>

Sumber: Peraturan Walikota Padang No 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bawa implementor dari Program Adiwiyata di Kota Padang memiliki tugas masing-masing, sesuai dengan tupoksi masing-masing

dinas, agar dapat mewujudkan tujuan Adiwiyata, yaitu menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat mengetahui apakah implementor mengetahui tupoksinya, dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini:

“Dinas Lingkungan Hidup memiliki peranan penting dalam Adiwiyata. Kami memberi dukungan penuh kepada pihak sekolah yang mau menjaga lingkungan sekolahnya, selain itu kami juga membuka peluang bagi pihak sekolah untuk datang dan bertanya secara langsung mengenai apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Tentu saja program Adiwiyata tidak hanya dari DLH saja, program ini membutuhkan dukungan dan bantuan dari banyak pihak, agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan Adiwiyata tersebut”. (Wawancara dengan ibuk T. Masfetrin, S. Pt, M. Si Kabid PK2L DLH Kota Padang, tanggal 21 Maret 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasi Penjamin Mutu Dinas Pendidikan Kota Padang, sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan dalam program Adiwiyata memberikan dukungan dan sangat berharap apabila sekolah sangat bersemangat dalam melaksanakan program Adiwiyata. Kami disini hanya bisa memberikan dukungan, dan bantuan berupa tong sampah, selebihnya itu kami serahkan kepada sekolah, mau diapakan sekolahnya, supaya nanti bisa nyaman, aman, bersih dan hijau” (wawancara dengan Bapak Indriyedy Bakri, S. Pd, MT Kasi Penjamin Mutu dan Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Padang, tanggal 26 Maret 2018)

Selain itu, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Afri Moni, bagian Pengembang Sarana dan Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah, sebagai berikut:

“Kemenag dalam Program Adiwiyata itu berhubungan dengan madrasah, namun kalau untuk kegiatan program itu menyesuaikan saja dengan apa yang dilakukan sekolah umum. Karena kemenag sendiri tidak memiliki kegiatan khusus untuk Adiwiyata. kalau keterlibatan itu dalam kegiatan penilaian, yang mana ditunjuk oleh bidang Kesra dan berkoordinasi dengan DLH” (wawancara dengan Bapak Afri Moni, bagian pengembang sarana dan prasarana seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kota Padang, tanggal 27 Maret 2018)



Selain itu, pihak sekolah juga menunjukkan kesiapannya dalam melaksanakan program Adiwiyata, terbukti dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung Adiwiyata disekolah. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang belum Adiwiyata. Untuk mencapai tujuan Adiwiyata tersebut, sekolah juga menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah, seperti puskesmas, masyarakat, DLH dan Dinas Pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil wawancara peneliti dengan ketua Tim Adiwiyata Sekolah, sebagai berikut:

“sekolah kami memiliki visi unggul dalam prestasi, agamis dan menciptakan lingkungan sehat. Beberapa fasilitas yang mendukung program Adiwiyata, seperti mushola, bank sampah, biopori, sumur resapan, tong sampah dan lain-lainnya. selain itu kami juga menjalin kerjasama dengan Universitas Bung Hatta mengenai bank sampah, dan puskesmas perihal dokter kecil dan uji sampel makanan”. (wawancara dengan Bapak marsal Maret, S. Pd, sebagai operator tim Adiwiyata SDN 13 Nanggalo Kota Padang, pada tanggal 14 Mei 2018)

Hal diatas senada dengan yang hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Nur'aina selaku Ketua tim Adiwiyata dari SMPN 31 Andalas Kota Padang, sebagai berikut:

“dalam program Adiwiyata, sekolah kami mempunyai satu program dalam usaha mengumpulkan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan-kegiatan Adiwiyata, yaitu program infak Adiwiyata. Selain dari infak Adiwiyata, Kami mengalokasikan 20% dari dana bos untuk kegiatan Adiwiyata. Untuk sarana dan prasarana itu sudah sangat memadai, bahkan kantin kami sudah lulus uji oleh BPOM” (wawancara dengan Ibuk Nuraina, selaku ketua tim Adiwiyata SMPN 31 Andalas, Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2018)

Selain dari Implementor diatas, ada beberapa aktor yang terlibat dalam implementasi program Adiwiyata di Kota Padang. Siapa saja aktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 8**  
**Aktor yang Terlibat dalam Program Adiwiyata di Kota Padang**

No.	Aktor Terlibat
1.	WALHI Sumatera Barat
2.	Radio Arbes
3.	Masyarakat sekitar sekolah
4.	Siswa
5.	Puskesmas
6.	Camat

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa aktor pelaksana dari Program Adiwiyata Kota Padang terdiri dari LSM Walhi Sumatera Barat, Walhi Sumatera Barat merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang lingkungan. Walhi berperan dalam penilaian dan penyuluhan tentang lingkungan kepada sekolah yang mengajukan permintaan untuk diadakannya penyuluhan pada sekolah tersebut. Selain itu, terdapat keterlibatan media massa sebagai aktor pelaksanaan Adiwiyata, yaitu Radio Arbes. Radio Arbes dalam hal ini berperan sebagai media sosialisasi dan anggota tim penilai dari program Adiwiyata. Keterlibatan media massa dalam pelaksanaan Adiwiyata sudah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Di Kota Padang, Radio Arbes ditunjuk sebagai tim teknis Adiwiyata melalui Surat Keputusan Walikota, sebagai tim penilai Adiwiyata.

Dalam lingkungan sekolah, terdapat siswa sebagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Adiwiyata di sekolah. Selain siswa, penjaga kantin juga dituntut untuk mampu menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan menjaga kelestariannya. Untuk penjaga kantin, diharuskan untuk menyediakan makanan/jajanan yang bersih serta tidak memakai wadah atau kemasan plastik. Setiap sekolah Adiwiyata

diwajibkan memiliki kantin yang telah lulus dengan uji sampel makanan melalui BPOM Kota Padang. Seperti SDN 13 Nanggalo Kota Padang dan SMPN 31 Andalas yang telah lulus tes uji sampel makanan oleh BPOM.

Siswa berperan penting dalam Adiwiyata, sebagai sasaran dari program, maka siswa diharapkan mampu menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang siswa dari SMPN 31 Kota Padang, sebagai berikut:

“Adiwiyata itu menjaga lingkungan sekitar kita, menjadi bersih, nyaman, dan hijau” (wawancara dengan Ilham Daffa Putra, selaku siswa SMPN 31 Kota Padang, pada tanggal 10 Juli 2018)

Selain itu terdapat Puskesmas yang juga merupakan aktor pelaksanaan program Adiwiyata. Puskesmas melalui program Kesling, melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Sedangkan Camat sebagai fasilitator antara sekolah dengan masyarakat dalam hal menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Bagaimanapun, kebersihan lingkungan luar sekolah juga berpengaruh terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan dalam sekolah. Namun, melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu staf dari salah satu kecamatan di Kota Padang, peneliti menemukan bahwa, kecamatan dalam program Adiwiyata bersifat pasif, artinya camat hanya menghadiri acara yang diadakan sekolah, seperti hal nya sosialisasi, penilaian, penyuluhan dan lain sebagainya. Namun, dalam hal ini kecamatan tidak memiliki arsip maupun dokumen tentang Adiwiyata. hal tersebut seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“kami hanya menghadiri jika ada undangan yang datang dari sekolah, misalkan untuk menjadi Pembina upacara, terus kalau ada penilaian Adiwiyata. Cuma nanti di foto saja, yang di jadikan dokumen dan diarsipkan itu tidak ada. Karena kami tidak ada tupoksi buat dokumen dan laporan Adiwiyata. karena Adiwiyata kan itu di DLH sama Dinas Pendidikan”. (wawancara dengan ibuk Ir. Maidarnisyah, selaku Kasi tata Pemerintahan Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada tanggal 25 Mei 2018)

Secara umum, indikator siswa yang memahami Adiwiyata adalah mampu menjaga kebersihan lingkungannya, dengan membuang sampah secara terpisah sesuai dengan jenis sampah tersebut, dan mampu mengingatkan sesama-nya untuk membuang sampah dan menjaga kelestarian lingkungan, serta memiliki jiwa yang berkarakter sehingga mempunyai budi pekerti yang baik. Dari kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, hendaknya mampu mengurangi masalah-masalah lingkungan di masa yang akan datang. Karena membiasakan diri dari kecil untuk menjaga kebersihan lingkungan harus di terapkan agar kelak tercipta pribadi yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Dari pemaparan diatas, dilihat dari model implementasi Ripley dan Franklin dapat diketahui bahwa dari segi jabatan maka dapat dikatakan bahwa implementor telah sesuai dengan kebutuhan program. Begitu juga dengan aktor seperti LSM-WALHI, Radio Arbes, dan puskesmas sudah sangat mencukupi jumlahnya untuk melaksanakan program Adiwiyata. Sedangkan dari segi *identity* petunjuk program telah mengatur sedemikian rupa mengenai tugas pokok dan fungsi dari implementor yang satu dan yang lainnya, sehingga implementor dapat bekerja sesuai dengan wilayah masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Namun, dalam pelaksanaan tupoksi implementor masih belum maksimal, karena sebagian

besar dari implementor tidak mengetahui apa tupoksi nya, dengan alasan mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan sejak tanggal 10 Oktober 2016 oleh Walikota Padang.

#### **5. 2. 1. 2 Peran dari Kelompok Berkepentingan (*The Role Of Interest Group*)**

Peran dari kelompok kepentingan yang dimaksud dalam indikator ini adalah sejauh mana kelompok kepentingan mendukung atau tidak kebijakan. Sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan saja, namun secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang berada di dalam dan luar lingkup kebijakan. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ini, peneliti melihat apakah ada kelompok kepentingan seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan umumnya Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, dan Radio Arbes sebagai Media Massa yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan Program Adiwiyata di Kota Padang.

##### **5. 2. 1. 2. 1 WALHI Sumatera Barat**

WALHI merupakan salah satu organisasi yang aktif bergerak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam program Adiwiyata, WALHI bereperan sebagai tim penilai. Pembentukan tim penilai Adiwiyata berdasarkan surat keputusan Walikota Padang. Peran WALHI dalam program Adiwiyata daapt dilihat dari kutipan wawancara berikut ini:

“kita di WALHI itu sebagai tim penilai Adiwiyata, yaitu ada satu orang yang ditugaskan untuk menilai sekolah Adiwiyata, verifikasi dan cek fisik. Selain fisik, visi dan misi sekolah juga kami nilai, termasuk juga unsur di dalam sekolah itu sendiri, seperti kepala sekolah, guru dan staf, dan siswa” (wawancara dengan Febi Yulkia Erika, selaku anggota tim penilai Adiwiyata dari LSM WALHI Sumatera Barat, pada tanggal 26 Januari 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa LSM-WALHI berperan sebagaisalah satu anggota tim penilai. Selain sebagai penilai, WALHI juga pernah melakukan penyuluhan tentang lingkungan ke sekolah-sekolah. Hal tersebut terjadi apabila ada sekolah yang mengundang untuk diadakannya penyuluhan.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, WALHI mengatakan sangat mendukung program Adiwiyata, karena Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Seperti yang peneliti tuliskan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Program Adiwiyata merupakan program yang sangat bagus dan bermanfaat juga, jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kita lihat sekarang, musibah banjir yang disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Program Adiwiyata hadir dengan konsep dan tujuan untuk merubah perilaku bangsa sejak dini, untuk merawat dan mencintai lingkungan. Pertanyaannya, seberapa efektifkah program Adiwiyata ini?, itu yang belum kami dapatkan jawabannya. Mengingat telah hampir 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan Adiwiyata di Kota Padang, dan telah menghasilkan banyak sekolah Adiwiyata, tetapi masih ada bencana-bencana sebagai akibat dari kerusakan lingkungan di Kota Padang”. (wawancara dengan Febi Yulia Erita, S. Pd selaku staf dari WALHI Sumatera Barat, pada tanggal 1 Agustus 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pendapat WALHI terhadap Program Adiwiyata sangat mendukung jalannya Program Adiwiyata, namun setelah lama berlangsung, Program Adiwiyata masih belum mampu merubah karakter siswa dalam hal merawat dan melestarikan lingkungan. Terbukti dengan masih

banyaknya siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga dalam jumlah besar dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan pencemaran lingkungan.

Keterlibatan WALHI dalam Program Adiwiyata diatur melalui Surat keputusan Walikota Padang mengenai Tim Penilai Sekolah Adiwiyata. Namun, dalam hal dokumen, WALHI tidak mempunyai dokumen yang merangkum kegiatan Adiwiyata. hal ini menyulitkan peneliti untuk mengidentifikasi pelaksanaan Adiwiyata oleh WALHI Sumatera Barat.

#### **5. 2. 1. 2. 2 Radio Arbes FM**

Radio Arbes merupakan salah satu Radio swasta di Kota Padang, yang telah berdiri sejak tanggal 1 Mei 1972. Dalam Adiwiyata Radio Arbes berperan sebagai tim Penilai, yang telah ditetapkan melalui surat Keputusan Walikota Padang. Peran dari Radio Arbes dalam pelaksanaan Adiwiyata dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

“Saya sebagai pimpinan Arbes, ikut serta sebagai tim penilai Adiwiyata, berdasarkan SK dari Walikota, sejak tahun 2008. Selain sebagai tim Penilai, nanti juga ada sosialisasi yang disiarkan melalui radio Arbes, seperti himbauan untuk melaksanakan Adiwiyata, himbauan untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya” (wawancara dengan Bapak Jejeng Azwardi selaku pimpinan Radio Arbes, pada tanggal 8 Juni 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa keterlibatan Radio Arbes dalam program Adiwiyata yaitu melibatkan pimpinannya sebagai anggota tim penilai Adiwiyata, telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sebagai penilai Adiwiyata, pimpinan radio arbes mengaku mendapat pelatihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Dinas Lingkungan Hidup, satu minggu sebelum penilaian dilaksanakan. Hal ini diungkapkan oleh pimpinan Radio Arbes, seperti kutipan wawancara berikut:

“...kalau pelatihan sebagai tim penilai, kami diberitahukan melalui *Whatsapp* atau telepon bahwa akan ada penilaian, apakah bersedia untuk menjadi tim penilai? Kalau bersedia, nanti datang ke DLH disana *briefing*”(wawancara dengan Bapak Jejeng Azwardi, selaku pimpinan Radio Arber, pada tanggal 8 Juni 2018)

Dari wawancara diatas, hal yang dapat peneliti simpulkan adalah, bahwa pelatihan yang dimaksud oleh pimpinan Radio Arbes tersebut yaitu berupa pemberitahuan bahwa akan diadakan penilaian pada waktu tersebut. Melihat perkembangan program Adiwiyata, pimpinan Radio Arbes menilai bahwa, masih banyak sekolah yang menolak untuk dilakukan pembinaan Adiwiyata, hal ini terus berdampak pada penilaian. Ada sekolah yang tidak serius dengan Program Adiwiyata, sehingga persiapan yang dilakukan terkesan terburu-buru. Hal ini menjadi komponen penilaian bagi tim penilai. Banyaknya ditemukan sekolah yang tidak ada kesesuaian antara aplikasi dan keadaan lingkungan yang sebenarnya. Hal ini tentu mempengaruhi penilaian.

“...meski Kota Padang memiliki banyak sekolah Adiwiyata, namun dari semua itu baru sekitar 60% yang paham dengan prinsip dan tujuan dari Program Adiwiyata. Bahkan, sekolah favorit pun tidak selaras dengan Adiwiyata. karena mereka berpikir, lebih baik mengejar predikat akademik, daripada penghargaan Adiwiyata”. (wawancara dengan Jejeng Azwardi, pimpinan Radio Arbes, pada tanggal 8 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa, meskipun banyak sekolah Adiwiyata di Kota Padang, masih belum semua sekolah mengerti dengan prinsip dan paham dengan Adiwiyata, bahkan sekolah yang termasuk dalam sekolah favorit tidak



selaras tujuannya dengan Program Adiwiyata, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim Adiwiyata Kota Padang untuk melakukan pembinaan.

Sebagai tim penilai, pimpinan Radio Arbes juga merasa bertanggung jawab dalam menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan pihak radio melalui siaran-siaran yang menembus seluruh wilayah Kota Padang, diharapkan mampu menyadarkan pihak sekolah dan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama melalui program Adiwiyata yang diharapkan mampu menjadikan anak mempunyai sifat berbudaya lingkungan.

Menurut hasil paparan wawancara dan observasi peneliti tersebut dengan menggunakan teori Ripley dan Franklin, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang berperan dalam pelaksanaan Adiwiyata di Kota Padang berasal dari LSM lingkungan dan Media, yaitu LSM-WALHI dan Radio Arbes, dapat dikatakan telah berperan aktif dalam Program Adiwiyata sebagai anggota tim Penilai dan memiliki komitmen dalam menjaga lingkungan sehingga pihak tersebut aktif dalam kampanye Program Adiwiyata, meskipun hanya pada tahap sosialisasi, yang diharapkan mampu mewujudkan seluruh sekolah di Kota Padang menjadi sekolah berbudaya lingkungan.

### **5. 2. 1. 3 Ketiadaan Hierarki (*Lock of Hoerarchy*)**

Sangat penting untuk melihat bagaimana hubungan atau ada tidaknya garis komando antara implementor. Hubungan rantai komando bahkan lebih menyebabkan kompleksitas pelaksanaan program dibandingkan banyaknya jumlah atau aktor yang terlibat. Adanya garis komando dapat memaksimalkan proses implementasi program.

Hubungan atau garis komando yang terbentuk dalam proses implementasi program berupa bagaimana atasan formal memerintahkan atau memberikan komando kepada bawahannya untuk melaksanakan program secara baik. Hubungan atau rantai komando juga dapat dilihat dari bagaimana lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan program saling berkoordinasi dengan baik selama proses implementasi.

Dalam penelitian Implementasi program Adiwiyata di Kota Padang ini, peneliti ingin melihat bagaimana garis komando atau hubungan koordinasi yang terjadi pada:

- a) Hubungan antar OPD yang terlibat
- b) Hubungan sekolah dengan OPD yang terlibat.

Hubungan atau garis komando yang terbentuk dari pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang adalah tidak adanya keharusan untuk setiap OPD yang terlibat memberikan laporan dan sanksi kepada OPD lainnya jika tidak melaksanakan tugas mereka sesuai dengan Peraturan Walikota. Hubungan yang terjalin hanya sebatas saling bantu membantu dalam pelaksanaan program, tidak ada kewenangan dari OPD lainnya untuk memaksa dan memeriksa pelaksanaan tugas dari OPD lainnya.

#### **a. Hubungan Antar OPD yang terlibat**

Dalam pelaksanaan program Adiwiyata di Kota Padang, seluruh dinas yang terlibat pelaksanaan menjalin hubungan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi, dan saling membantu satu sama lainnya jika dibutuhkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut ini:

“kalau hubungan dengan OPD lainnya yang terlibat itu ya paling dengan Dinas pendidikan dan Kemenag ya, karena kami hanya bisa menghimbau, bukan untuk memberi perintah karena garis komando juga. Selain itu tidak ada berkoordinasi dengan OPD lainnya, karena yang pasti terlibat itu Dinas Pendidikan dan Kemenag dalam hal mengawasi sekolah atau madrasah” (wawancara dengan ibuk T. Masfertrin S. Pt, M. si selaku kabid PK2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 21 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Penjamin Mutu dan Pengawas Dinas

Pendidikan sebagai berikut:

“kami berkoordinasi dengan DLH yang sangat penting sekali karena kan ini program nya dari DLH sebenarnya yang berwenang, kalau kami itu sebagai fasilitator saja antara DLH dengan sekolah. Selain dengan DLH kami juga berkoordinasi dengan Puskesmas, Camat dan Lurah untuk mengawasi dan membantu pembinaan terhadap sekolah-sekolah wilayah hukum mereka terkait dengan kesehatan lingkungan, dan Adiwiyata” (wawancara dengan bapak Indriyedy Bakri, S. Pd, M. T selaku Kasi Penjamin Mutu dan Pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 26 Maret 2018)

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup, Kemenag juga terlibat dalam implementasi program Adiwiyata, dalam implementasi Adiwiyata, Kemenag juga menjalin hubungan koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup. Seperti dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan implementor dari Kemenag sebagai berikut:

“sejauh ini koordinasi dengan DLH dan Dinas Pendidikan baik-baik saja. Seperti apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan juga sampai pada kami, nanti kami juga ikut kegiatannya. Soalnya kan program Adiwiyata di Kemenag tidak punya anggaran khusus, jadi ya seadanya saja dijalankan” (wawancara dengan Bapak Afri Moni, selaku staff bagian pengembang sarana dan prasarana seksi pendidikan madrasah Kemenag Kota Padang, pada tanggal 27 Maret 2018)

Berdasarkan beberapa kutipan hasil wawancara diatas, jelas terlihat bahwa adanya koordinasi yang terjalin antar implementor Program Adiwiyata. Terlihat bahwa Dinas Pendidikan dan Kemenag Kota Padang melakukan koordinasi dengan DLH, karena Program Adiwiyata memang di limpahkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya pada DLH. Dinas Pendidikan merupakan dinas yang bertanggung jawab terhadap sekolah, begitu juga dengan Kemenag. Sementara itu DLH merupakan dinas yang memiliki tugas untuk membina dan mengawasi jalannya kegiatan dari Program Adiwiyata yang dilaksanakan oleh sekolah.

#### **b. Hubungan Sekolah dengan OPD yang terlibat**

Sekolah dalam program Adiwiyata merupakan muara dari kegiatan Adiwiyata. Pada lingkungan sekolah lah program Adiwiyata diterapkan. Semua kegiatan sekolah harus mencerminkan Adiwiyata, seperti visi dan misi yang harus mencakup menjaga dan berbudaya lingkungan. Dengan visi dan misi tersebut sekolah dapat menjalankan kegiatan pada siswa atau warga sekolahnya, agar menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaan program Adiwiyata, sekolah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan (untuk sekolah umum) dan dengan Kemenag (untuk sekolah agama). Selain itu sekolah bebas bekerja sama dengan OPD lain yang ada di Kota Padang, seperti dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, dan lain-lain.

Hal ini peneliti jelaskan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah dan OPD yang terlibat, sebagai berikut:

“kami berkoordinasi itu dengan DLH, Dinas Pendidikan, Universitas Bung Hatta, dan Puskesmas. Kalau dengan DLH itu kita koordinasi nya dengan *sosmed* saja, kita punya grup *Whatsapp* nanti disitu DLH akan memantau *progress* dari sekolah kami. Kalau sama Dinas Pendidikan itu melalui pengawas yang kadang setiap 1 kali seminggu datang ke sekolah kami. Dengan Bung Hatta itu tentang Bank Sampah, dengan Puskesmas itu tentang Unit Dokter Kecil, uji sampel makanan, dan ada juga dengan masyarakat, mereka yang memberi bantuan seperti pot bunga, kegiatan gotong royong”. (wawancara dengan bapak Marsal Maret, S. Pd selaku operator Tim Adiwiyata SDN 13 Nanggalo Kota Padang, tanggal 14 Mei 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua Adiwiyata dari SMPN 31 Kota Padang, sebagai berikut:

“kalau koordinasi dengan dinas-dinas itu ya sama DLH, Dinas Pendidikan yang pastinya. Kemudian kerjasama dengan puskesmas. Koordinasi nya dalam bentuk komunikasi melalui *WhatsApp*, dengan kunjungan, seperti kami mengunjungi DLH” (Wawancara dengan ibuk Nuraina, selaku Ketua Tim Adiwiyata SMPN 31 Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2018)

Mengenai koordinasi sekolah dengan OPD lainnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu puskesmas, yaitu puskesmas Andalas, sebagai berikut:

“puskesmas itu wajib membina sekolah di wilayah tugasnya, terutama kan masalah lingkungan. Di puskesmas itu ada beberapa program yang ditujukan kepada sekolah, yaitu UKS, Kesling, Promkes, dan Gizi. Kalau untuk Adiwiyata itu program kesling (kesehatan lingkungan), seperti pembuangan dan pengolahan sampah, jamban, pengelolaan air limbah, penghijauan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kami melakukan kunjungan kepada sekolah itu 2 kali dalam setahun, dan tanpa surat perjanjian, atau MOU. Jadi puskesmas datang berkunjung dan membina, begitu saja” (wawancara dengan ibuk Neriwati, selaku penanggung jawab program Kesling, Puskesmas Andalas Kota Padang, pada tanggal 28 Mei 2018)

Selain itu, MTsN Durian Tarung juga menjalin koordinasi dengan DLH dan Kemenag dalam program Adiwiyata, hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti, sebagai berikut:

“koordinasi kami dengan DLH dan Kemenag itu berjalan dengan baik. Kadang datang ke DLH kalau ada yang akan diurus untuk persiapan Adiwiyata. Kalau Kemenag datang meninjau langsung ke sekolah, sekalian melakukan pengawasan kesekolah. Selain itu, kami juga sering berkoordinasi dengan pemerintah setempat, seperti camat dan lurah, untuk kegiatan gotong royong” (wawancara dengan bapak Firdaus, S. Pdi, selaku Guru/Ketua Tim Adiwiyata MTsN 2 Durian Tarung Kota Padang, pada tanggal 9 Mei 2018)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa sekolah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan OPD yang ada di Kota Padang terkait dengan Adiwiyata. Seperti yang dilakukan sekolah dengan Puskesmas dalam program Kesling yang mencakup kebersihan lingkungan, pembuangan sampah, pengolahan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan dan Toga, uji sampel makanan kantin sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebersihan dan pelestarian lingkungan.

Selain dengan puskesmas, ada sekolah yang berkoordinasi dengan perguruan tinggi, seperti dengan Universitas Bung Hatta dalam kerjasama mengenai bank sampah, dan pemerintah setempat seperti camat dan lurah, ketika mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar sekolah dengan melibatkan warga masyarakat sekitar. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kuranji, sebagai berikut:

“keterlibatan dalam Adiwiyata yaitu kalau ada undangan untuk jadi Pembina upacara, nanti kita selipkan himbauan untuk menjaga kebersihan, selain itu dalam kegiatan gotong royong, dan kegiatan penilaian Adiwiyata, nanti kami dari pihak kecamatan itu sebagai pendamping” (wawancara dengan ibu Ir. Maidarnisyah, selaku Kasi tata pemerintahan, Kecamatan Kuranji Kota Padang, pada tanggal 25 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat adanya hubungan koordinasi antara sekolah dengan camat. Sekolah mempunyai hubungan koordinasi yang sangat baik dengan pemerintah setempat. Dukungan juga diberikan oleh pihak kecamatan untuk sekolah dalam membenahi sekolah menjadi bersih, sehat dan berbudaya lingkungan. Dukungan dari kecamatan diperlukan sebagai fasilitator antara sekolah dengan masyarakat, agar masyarakat membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar sekolah.

Berdasarkan model implementasi Ripley dan Franklin, implementasi program dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu variabel *the profussion of actors* (banyaknya aktor yang terlibat), maka implementor yang terlibat dalam program Adiwiyata telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program, diantaranya dari unsur pendidikan dan kebersihan lingkungan, dengan ini maka pelaksanaan program seharusnya telah berjalan maksimal. Namun, masih banyak implementor yang belum memahami dan melaksanakan tupoksinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai pedoman pelaksanaan program yang dikeluarkan melalui peraturan walikota, sehingga implementor cenderung tidak mengetahui dan memahami tupoksi mereka yang seharusnya sesuai dengan pedoman yang ada di peraturan walikota, sehingga tupoksi tersebut ada yang tidak dijalankan oleh implementor. Sedangkan pada indikator peran dari pihak berkepentingan, peran dari LSM-WALHI sebagai anggota tim penilai sudah sangat membantu pelaksanaan program Adiwiyata. Dimana WALHI sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup membantu dalam menilai kelayakan dari sekolah, apakah layak

untuk menjadi sekolah Adiwiyata atau tidak. Selain itu, ada Radio Arbes, yang merupakan salah satu media yang diikutsertakan dalam kegiatan penilaian sekolah calon Adiwiyata. Dalam hal ini, pihak dari Radio Arbes telah memberikan kontribusi yang nyata dalam hal penilaian, sehingga dapat menyeleksi sekolah-sekolah agar layak menjadi sekolah Adiwiyata. Selanjutnya, terdapat hubungan koordinasi antara dinas-dinas yang menjadi implementor program sudah sangat baik, yaitu hubungan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, berjalan dengan sangat baik, saling memberikan dukungan dan menjalin komunikasi yang baik. Begitu juga hubungan koordinasi antara sekolah dengan OPD lainnya juga sudah terjalin dengan sangat baik. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan implementasi program Adiwiyata di Kota Padang berjalan dengan baik dan lancar, tanpa hambatan yang berarti.

### **5.2.2 Kejelasan Tujuan (*The Multiplicity and Vagueness of Goals*)**

Ripley mengatakan bahwa kejelasan tujuan kebijakan berkaitan dengan apa yang ada dalam isi dan konteks kebijakan. Kejelasan isi kebijakan akan memudahkan implementor dalam memahami dan menjadikan kebijakan menjadi sebuah tindakan. Begitu sebaliknya, jika isi kebijakan tidak jelas maka akan kesulitan bagi implementor untuk memahami dan mengimplementasikan program tersebut. Dalam penelitian implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang yang peneliti lakukan ini, kejelasan isi dan tujuan kebijakan berpedoman pada pedoman pelaksanaan program Adiwiyata, apakah telah menerangkan secara rinci/detilkah tujuan dari program tersebut, sehingga mudah dipahami implementor atau masih bersifat umum.



Untuk melihat apakah tujuan dimengerti dengan baik oleh implementor dapat dilihat dari sejauh mana implementor paham dan mengerti dengan tujuan dari program Adiwiyata ini, dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian, sebagai berikut:

“program Adiwiyata ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang hijau dan bersih. Karena perilaku hidup bersih harus diterapkan sejak dini, maka program Adiwiyata ini ada dan ditujukan kepada siswa sekolah, agar mampu merawat dan melestarikan lingkungannya. Kalau Kemenag sangat mendukung program Adiwiyata, karena kebersihan itu sebagian dari iman, dan untuk menciptakan generasi penerus yang cinta dan peduli dengan lingkungan” (wawancara dengan Bapak Afri Moni, Kemenag Kota Padang, pada tanggal 27 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Tim Adiwiyata sekolah, sebagai berikut:

“kami sangat senang dengan adanya program Adiwiyata, sehingga sekolah bisa menjadi lebih bersih, hijau, dan sangat nyaman untuk suasana belajar. Memang tujuan sebenarnya dari Adiwiyata itu kan agar siswa paham membedakan jenis sampah, bagaimana seharusnya pengelolaan lingkungan, dan melatih siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan nya” (wawancara dengan Ibu Nuraina selaku ketua Tim Adiwiyata SMPN 31 Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa OPD maupun dari pihak sekolah telah memahami maksud dan tujuan dari program Adiwiyata secara umumnya. Namun, dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan OPD lainnya, peneliti menemukan bahwa tidak satupun implementor yang mengetahui tentang adanya pedoman pelaksanaan program Adiwiyata, yang diatur dalam peraturan walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. dari fenomena ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada dilakukan sosialisasi mengenai pedoman pelaksanaan program

tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:

“saya tidak tau tentang perwako itu, karena kan kita menurut kepada instruksi yang diberikan oleh DLH. Kalau mengenai Program Adiwiyata sendiri, itu ada peraturan menteriya, melalui itu kami mempelajari Adiwiyata, dan dibantu dengan DLH” (wawancara peneliti dengan Bapak Indriyedi Bakri, S. Pd, MT selaku Kasi penjaminan mutu dan pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 26 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa implementor mengetahui program Adiwiyata melalui pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sementara itu, implementor tidak mengetahui mengenai Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman pelaksanaan Adiwiyata. tetapi, walaupun implementor tidak ada yang memahami dan mengetahui pedoman yang dari perwako tersebut, rata-rata seluruh implementor memahami tujuan dan maksud dari Program Adiwiyata.

### **5.2.3 Perkembangan dan Kompleksitas Program Pemerintah (*The Proliferation and Complexity of Government Programs*)**

Dalam variabel ini peneliti ingin melihat sejauh mana pemerintah mempersiapkan Program Adiwiyata, menyangkut kelengkapan-kelengkapan program, seperti adanya SOP (standar operasional prosedur), petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait dengan pelaksanaan program Adiwiyata di Kota Padang.

Program Adiwiyata merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara serentak pada seluruh kabupaten/kota provinsi yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilandasi pada Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup No 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Berlandaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut, maka Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Tujuan dari program Adiwiyata sejalan dengan program-program pemerintah lainnya untuk menciptakan Kota Padang yang bersih dan sehat. Beberapa contoh program lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan Program Adiwiyata yaitu Program Gerakan Padang Bersih dan Padang Sehat, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Padang No 24 Tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat. Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (GPBPS) merupakan rangkaian kegiatan dan partisipasi OPD dan warga Kota Padang untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dan sehat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Tujuan dari diterapkannya GPBPS ini adalah:

- a. Meningkatkan peran serta OPD, PNS dan warga masyarakat Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih dan sehat.
- b. Memberikan arahan kepada OPD dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran yang dapat menunjang pencapaian Kota Padang yang bersih dan sehat.

---

<sup>4</sup>Nela Rika Putri. Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Skripsi. Universitas Andalas 2018

- c. Mewujudkan budaya bersih bagi seluruh warga Kota Padang.

Selain itu, disekolah terdapat Unit Kesehatan Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi para murid dan warga lingkungan sekolah. Pada tahun 2015, Kota Padang berhasil meraih penghargaan di bidang UKS dengan meraih peringkat pertama di tingkat TK dan SMA pada lomba sekolah sehat tingkat Sumatera Barat.<sup>5</sup> Selanjutnya, program pemerintah yang sejalan pelaksanaannya dengan Program Adiwiyata adalah Program Adipura. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Indriyedi Bakri, S. Pd, MT, sebagai berikut:

“...program Adiwiyata dalam pelaksanaannya mendukung Kota Padang dalam meraih penghargaan Adipura. Karena penilaian Adipura itu berpusat pada sekolah-sekolah di Kota Padang, jadi jika sekolah kita bersih, maka lingkungan kita juga akan terlihat bersih, oleh karena itu, pelaksanaan Adiwiyata di Kota Padang menjadi suatu hal yang wajib, karena dapat menciptakan karakter para siswa kita untuk mencintai dan menjaga kebersihan lingkungannya, sehingga nanti akan berdampak pada perilaku mereka di lingkungan tempat tinggalnya juga.” (Wawancara dengan Bapak Indriyedi Bakri, S. Pd, MT selaku kasi penjaminan mutu dan pengawasan Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 26 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya program lain yang sejalan pelaksanaannya dengan program Adiwiyata, sehingga program Adiwiyata dan Adipura dalam pelaksanaannya dapat saling mendukung, karena memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, dan didukung dengan data pelengkap dan kutipan wawancara, di analisis menggunakan teori Ripley dan Franklin, maka

---

<sup>5</sup>Dikutip dari [www.valora.co.id/m/?mod=berita&id=3988](http://www.valora.co.id/m/?mod=berita&id=3988) diakses pada kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB

dapat peneliti simpulkan bahwa untuk variabel kompleksitas program pemerintah dalam pelaksanaan program Adiwiyata sudah sangat kompleks, karena adanya dukungan dan petunjuk pelaksanaan program yang jelas, serta beberapa program yang dilaksanakan sejalan dengan program Adiwiyata

#### **5.2.4 Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan (*The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels*)**

Besarnya dukungan publik terhadap penerimaan suatu program memberikan besarnya dampak positif bagi proses implementasi program. Dukungan publik yang mengikuti siklus tertentu menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, pada hakikatnya dukungan publik dalam menciptakan keberhasilan implementasi suatu program mensyaratkan adanya dukungan dari pemerintah.<sup>6</sup>

Dukungan pemerintah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program, karena apa yang menjadi tanggapan dari pemerintah yang akan menentukan apakah program berhasil di implementasikan atau tidak. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa implementor sangat mendukung tentang pelaksanaan program Adiwiyata, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, sebagai berikut:

“kami sangat mendukung pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah, karena program nya sangat bagus, membiasakan diri menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan sejak dini yang diharapkan

---

<sup>6</sup>Indah Setiawati, *Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Karakter di SMPN 1 Rambatan, Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. Universitas Andalas: 2014, hlm 53

akan terbawa hingga nanti dewasa” (wawancara dengan bapak Indriyedi Bakri, S. Pd, MT selaku kasi penjaminan mutu dan pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 26 Maret 2018)

Selain dukungan dari unit pemerintah sebagai implementor, diperlukan juga dukungan dan partisipasi dari siswa sekolah yang merupakan target dari program Adiwiyata. berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, siswa yang ada disekolah sangat mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan disekolah nya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu siswa, sebagai berikut:

“iya ada program Adiwiyata kak. Sekolah kami sudah jadi sekolah yang bersih dan hijau. Jadi senang disekolah, karena ada banyak kegiatan dari hasil kami menanam sayur, nanti ada kegiatan tahunan, itu makan sayur dan buah dari kebun sekolah” (wawancara dengan Nurul Puti Amanda, salah satu siswa sekolah di Kota Padang, pada tanggal 10 juli 2018)

Dari kutipan wawancara diatas, terlihat siswa sangat menyukai adanya program Adiwiyata, dengan berbagai kegiatan baru yang ada disekolahnya, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata. Selain dari wawancara diatas, bukti dari dukungan dari pemerintah dan target group terhadap program ini dapat dilihat bahwa program Adiwiyata masih berlangsung dilaksanakan hingga sekarang, dan Kota Padang menjadi satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sekolah Adiwiyata terbanyak.

Dukungan yang diberikan pemerintah seperti pemberian bantuan berupa dana, dan sarana prasarana, serta membuat pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Dalam pelaksanaan program, pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan

program melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Dimana di dalam perwako tersebut dijelaskan tupoksi dari masing-masing implementor dan tujuan dari program Adiwiyata. Selain dukungan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan program, dukungan dari pemerintah dapat berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana, pemberian dana dan dukungan moril.

Dalam pelaksanaan program Adiwiyata, bantuan yang diberikan pemerintah yaitu berupa tong sampah yang diberikan pada masing-masing sekolah, oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Penjaminan Mutu dan Pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang, sebagai berikut:

“dalam pelaksanaan Adiwiyata ini kami selain memberikan dukungan moril, kami juga memberikan dukungan dalam bentuk materil, seperti tong sampah. Kami memberikan tongsampah untuk setiap sekolah yang mengikuti program Adiwiyata, masing-masing sekolah itu dapat 1 paket tempat sampah terpilah” (wawancara dengan bapak Indriyedi Bakri S. Pd, MT selaku Kasi Penjaminan Mutu dan Pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 26 Maret 2018)

Wawancara diatas menunjukkan adanya dukungan baik moril maupun materil dalam pelaksanaan Adiwiyata yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, yaitu pemberian bantuan berupa tong sampah kepada sekolah-sekolah peserta pembinaan Program Adiwiyata

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, dan didukung dengan data pelengkap dan kutipan wawancara, di analisis menggunakan teori Ripley dan Franklin, maka dapat peneliti simpulkan bahwa untuk variabel partisipasi pada semua unit pemerintah pada pelaksanaan program Adiwiyata sudah baik, dengan adanya

pemberian bantuan dari Dinas terkait pada sekolah Adiwiyata menunjukkan adanya bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang.

#### **5. 2. 5 Faktor-Faktor Yang Tidak Terkendali Yang Mempengaruhi Implementasi ( *The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation* )**

Dalam pelaksanaan implementasi sebuah program atau kebijakan, tidak pernah terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses implementasi tersebut. Faktor-faktor tersebut muncul diluar kendali implementor, sehingga dapat mengganggu jalannya implementasi program yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi berbagai faktor atau gangguan teknis yang muncul, maka diperlukan perilaku dan reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Pada pelaksanaan program Adiwiyata, faktor yang tidak terkendali yaitu perilaku menjaga kebersihan dari warga sekolah atau kesadaran siswa sekolah akan kebersihan, dan faktor geografis dari lingkungan sekolah tersebut. Perilaku bersih tertanam pada pribadi manusia itu sendiri, akan sulit diarahkan jika dalam diri manusia tidak tertanam perilaku cinta lingkungan, sehingga masih kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Kesulitan dalam mengarahkan warga sekolah untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.



Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan, sebagai berikut:

“program Adiwiyata ini sebenarnya bagus, dalam membiasakan diri merawat lingkungan. Namun, sayangnya masih banyak siswa yang belum tertanam dalam dirinya untuk merawat dan menjaga lingkungan. Seperti masih banyak siswa-siswa yang kalau pulang sekolah, nanti naik angkutan umum, lalu mereka dengan santai membuang sampah kejalan”(wawancara dengan staf LSM-WALHI Febi Yulvia Erita, S. Pd. pada tanggal 1 Agustus 2018)

Selain dari faktor perilaku siswa sekolah, salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program Adiwiyata yaitu, keterbatasan anggaran di sekolah untuk mendukung pelaksanaan program Adiwiyata. Hal tersebut terjadi karena Program Adiwiyata tidak mempunyai anggaran khusus di sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus mampu mengalokasikan 20% dari dana BOS untuk program Adiwiyata. Hal tersebut peneliti dapatkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Adiwiyata sebagai berikut:

“salah satu kendala dari pelaksanaan Adiwiyata yaitu masalah anggaran. Oleh karena itu sekolah harus mampu memanfaatkan dana yang ada untuk menunjang pelaksanaan Adiwiyata. Selain itu, sekolah juga harus pintar dalam mencari *channel* dengan pihak swasta, seperti perusahaan” (wawancara dengan ibuk T. Masfetrin S. Pt, M. Si selaku Kabid PK2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 21 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Adiwiyata dari SMPN 31 Kota Padang, sebagai berikut:

“kami kekurangan dana untuk pelaksanaan program Adiwiyata, karena memang butuh banyak dana, untuk perawatan tanaman, dan lainnya. Untuk itu kami punya program infak Adiwiyata, yaitu infak khusus untuk program Adiwiyata, satu kali dalam seminggu. Selain itu dana juga dibantu dari alokasi dana BOS sebanyak 20% dan juga ada bantuan dari wali murid untuk pembangunan fasilitas sekolah yang menunjang Adiwiyata” (Wawancara dengan ibuk Nuraina selaku ketua tim Adiwiyata SMPN 31 Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2018)

Selain dari permasalahan diatas, terdapat faktor lain yang dapat menghambat pelaksanaan Adiwiyata, diantaranya keterbatasan lahan atau letak bangunan sekolah yang tidak mencukupi banyak tempat untuk penghijauan atau dibuat taman. Kebanyakan sekolah yang berada di tengah kota memiliki lahan yang terbatas, dan bahkan harus berbagi lahan dengan sekolah lain. Seperti SDN 13 Nanggalo yang harus berbagi lahan dengan SDN 15 Surau Gadang. Hal tersebut menjadi faktor yang tidak bisa dikendalikan, karena keterbatasan lahan dan keterbatasan dana, sehingga masih ada sekolah yang tidak bisa mengikuti pelaksanaan Adiwiyata. Karena dalam Adiwiyata diharuskan adanya beberapa komponen yang mengharuskan sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung, sehingga akan sulit terlaksana bagi sekolah yang tidak memiliki lahan yang cukup.

Kemauan kuat dari pihak sekolah juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan Adiwiyata. masih adanya ditemukan penolakan dari pihak sekolah dalam upaya implementor untuk melakukan pembinaan, menjadikan sekolah sangat sulit untuk dibina. Hal ini dapat ditemukan pada sekolah - sekolah swasta yang merupakan milik atau dikelola oleh yayasan, sehingga Dinas pendidikan atau kementerian Agama Kota Padang tidak memiliki wewenang khusus dalam memaksa atau melakukan pembinaan Adiwiyata kepada sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang, sebagai berikut:

“sejauh ini kalau untuk madrasah yang berstatus negeri, itu tidak ada masalah, mereka sangat bersemangat dengan pelaksanaan Adiwiyata. Masalah muncul pada madrasah yang berstatus milik yayasan, karena mereka mengurus sendiri struktur dan kebijakan madrasahnyanya. Sehingga sangat sulit bagi kemenag untuk memberikan

penekanan” (wawancara dengan bapak Afri Moni, selaku salah satu staf pengembang sarana dan prasarana seksi pendidikan madrasah, Kemenag Kota Padang, pada tanggal 27 Maret 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa faktor yang tidak terkendali dalam pelaksanaan Program Adiwiyata ada beberapa faktor yaitu, faktor manusia, dana dan faktor geografis. Faktor manusia yaitu masih kurangnya kesadaran dari warga sekolah untuk menjaga dan merawat lingkungan. Masih banyak nya ditemukan siswa yang membuang sampah pada sembaran tempat, serta masih adanya sampah yang ditemukan berserakan dilingkungan sekolah. Selain itu, faktor finansial atau dana yang masih mengalami kekurangan. Tidak adanya dana khusus yang dialokasikan untuk program Adiwiyata membuat sekolah yang tidak mempunyai dana atau donator mensiasati kekurangan dana tersebut. Pengalokasian dana BOS sebanyak 20% diharapkan mampu untuk menunjang pelaksanaan Adiwiyata, namun ternyata dana tersebut tidak cukup, sehingga sekolah harus mencari jalan lain untuk mendapatkan dana, termasuk dengan memungut sumbangan dari siswa-siswi dan orang tua murid yang bersedia.

Faktor lainnya yaitu faktor lingkungan sekolah di Kota Padang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Seperti yang kita ketahui, bahwa Adiwiyata meliputi sekolah yang hijau, bersih dan nyaman. Dengan ini tentu diperlukan lahan yang cukup untuk dilakukan penghijauan, penanaman pohon yang rindang, dan taman-taman sekolah yang menambah kesan nyaman. Bagi sebagian sekolah yang tidak mempunyai lahan yang cukup, terlebih bagi sekolah yang terletak di tengah pusat kota, tentu tidak mungkin untuk melakukan penanaman pohon rindang. Berbeda

dengan sekolah yang berada pada pinggiran kota, dan memiliki lahan yang masih asri, sehingga lebih mudah untuk dilakukan penghijauan sekolah.

Seiring dengan banyaknya faktor yang tentu saja tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, Kota Padang masih tetap saja menjadi salah satu kota yang berhasil memiliki banyak sekolah Adiwiyata, dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Melihat keberhasilan kota Padang dalam menerapkan Adiwiyata pada seluruh sekolah di Kota Padang, sehingga telah banyak sekolah yang mendapatkan penghargaan sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan maka dapat dinilai bahwa Kota Padang telah berhasil dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang.

### **5. 3 Implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang**

Pelaksanaan program Adiwiyata di Kota Padang dilaksanakan sejak tahun 2009. Namun, pada tahun 2014, Pemerintah Kota Padang mewajibkan seluruh sekolah di Kota Padang untuk melaksanakan komponen-komponen program Adiwiyata. Hal tersebut dimuat dalam Surat Edaran dari Walikota Padang Nomor 050. 2701/DP. Sekre. 3/VI/2014 tentang Adiwiyata. Selanjutnya petunjuk pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang, dimuat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 20116 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata, yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Walikota Padang Nomor 02 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Adiwiyata di Kota Padang.

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata, terdapat 4 instansi yang terlibat sebagai implementor dari program Adiwiyata, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, dan sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata yang dimaksud disini adalah sekolah yang akan menjadi objek penilaian, atau sekolah yang telah diusulkan untuk dinilai pada periode penilaian Adiwiyata. Di sekolah Adiwiyata, terdapat Guru dan Kepala Sekolah yang menjadi pelaksana dan siswa beserta warga sekolah yang menjadi target group dari program Adiwiyata. Namun, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, disekolah terdapat satu orang operator Adiwiyata yang mengurus dan mengambil alih pelaksanaan Adiwiyata di sekolah. Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh, operator atau ketua tim Adiwiyata sekolah telah mendapatkan mandat dari kepala sekolah untuk mengurus pelaksanaan Program Adiwiyata di sekolah tersebut.

Terkait dengan implementasi Adiwiyata, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang dan Kementerian Agama Kota Padang, memiliki tupoksi masing-masing sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata Kota Padang. Namun, setelah peneliti lakukan wawancara, kepada masing-masing implementor yang terlibat, peneliti menemukan fakta bahwa tidak satupun dari OPD terkait mengetahui tentang adanya pedoman pelaksanaan Adiwiyata yaitu Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tersebut. Sementara itu, Kota Padang dalam pelaksanaan Program Adiwiyata dapat dikatakan sangat sukses, terbukti dengan

begitu banyaknya sekolah di Kota Padang yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata dari tingkat kota hingga Mandiri.

Ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan dari keberhasilan program Adiwiyata dijalankan di Kota Padang. Pertama, implementor meskipun tidak mengetahui akan adanya pedoman pelaksanaan Program yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang, namun dalam pelaksanaan Adiwiyata implementor memberikan dukungan penuh, sehingga dalam bentuk dukungan tersebut, dapat memicu semangat sekolah target untuk mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata. Selain itu, bentuk komitmen pemerintah Kota Padang melalui surat edaran yang mewajibkan seluruh sekolah di Kota Padang untuk mengikuti pembinaan Adiwiyata, sehingga OPD yang terlibat sebagai implementor tidak perlu lagi bekerja keras mengingat adanya kesadaran dari sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan program Adiwiyata dan warga sekolah sebagai target dari program ini. Kedua, yaitu semangat dan komitmen sekolah dalam berlomba untuk mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata, sehingga sekolah mampu menciptakan kebijakan-kebijakan dan inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekolah.